

**GOLONGAN PUTIH (GOLPUT) DI KOTA PALEMBANG
PADA PILPRES TAHUN 2019 (Analisis Faktor Penyebab Dan
Strategi KPU Kota Palembang Dalam Mengurangi Angka
Golongan Putih)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana S1 Dalam Ilmu Politik**

Program Ilmu Politik

OLEH:

Nama : Rico Miranda Syahputra

Nim : 1627020104

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH

PALEMBANG TAHUN 2020/1442 H

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fak. Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, UIN Raden Fatah
di-

Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan bimbingan dengan sungguh-sungguh, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara Rico Miranda Syahputra NIM: 1627020104 yang berjudul **Golput Di Kota Palembang Pada Pilpres 2019 (Analisis Faktor Penyebab Dan Usaha Antisipasi Di Masa Depan Oleh KPU Kota Palembang)** sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqosah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang. Demikian, terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palembang, 21 Februari 2020

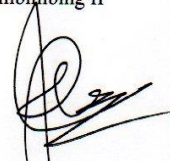
Pembimbing I



Dr. Andi Candra Java, S.Ag, M. Hum

NIP. 197201192007011011

Pembimbing II



Raegen Harahap, B.A., M.A

NIDP. 2011059202

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Rico Miranda Syahputra
NIM : 1627020104
Program Studi : Ilmu Politik
Judul Skripsi : Golongan Putih (Golput) Di Kota Palembang Pada Pilpres Tahun 2019 (Analisis Faktor Penyebab Dan Strategi KPU Kota Palembang Dalam Mengurangi Angka Golongan Putih)

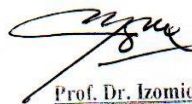
Telah dimunaqosahkan dalam sidang terbuka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 27 Februari 2020
Tempat : Ruang Sidang Munaqosah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang

Dan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata I (S1) pada Program Studi Ilmu Komunikasi.

Palembang, 5 Maret 2020

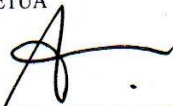
DEKAN



Prof. Dr. Izomiddin, M.A
NIP. 196206201988031991

TIM PENGUJI

KETUA



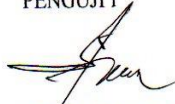
Dr. Ahmad Syukri, M.Si
NIP. 1977052500511014

SEKRETARIS



Gita Astrid, M.Si
NIDN. 2025128703

PENGUJI I



Taufik Akhvar, M.Si
NIDN. 19710913200031003

PENGUJI II



Afif Musthofa K. M.Sos
NIDN. 2027029302

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Rico Miranda Syahputra
NIM : 1627020104
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 15 Mei 1998
Status : Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Raden Fatah Palembang
Judul Skripsi : Golongan Putih (Golput) Di Kota Palembang
Pada Pilpres Tahun 2019 (Analisis Faktor
Penyebab Dan Strategi KPU Kota Palembang
Dalam Mengurangi Angka Golongan Putih)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi, pembahasan, dan kesimpulan yang disajikan dalam skripsi ini kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, serta pemikiran saya dengan pengarahannya pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah hasil dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.

Dengan pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidak benaran dalam pernyataan tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar akademik yang saya peroleh melalui pengajuan skripsi ini.

Palembang, 5 Maret 2020



Rico Miranda Syahputra
NIM: 1627020104

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

”Harapan selalu ada bagi orang yang percaya, hadapi setiap tantangan dalam hidup dengan niat mencari ridho Allah, lakukan usaha semaksimal mungkin sesuai kemampuan disertai doa dan jangan pernah menyerah”

PERSEMBAHKAN

Tulisan ini kuhadiahkan kepada yang selalu menjadi penyemangatku:

1. Kedua orang tuaku yang tercinta Abdul Halim dan Novi Desrani.
2. Adikku tercinta Bagas Dwi Kurniawan
3. Adik sepupu tercinta Phelia, Sultan, Saka, Sauqi, Seza dan yang lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
4. Kakekku tercinta Imron Rais.
5. Omku tercinta Bambang Edi Kusmiran dan Hendrick Ediman dan yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu.
6. Tanteuku tercinta Nunik dan Ayu serta yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
7. Keluargaku yang tercinta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu
8. Pembimbing I bapak Dr. Andi Candra Jaya, S.Ag, M. Hum
9. Pembimbing II bapak Raegen Harahap, M. A.
10. Penguji I bapak Taufik Akhyar, M.Si
11. Penguji II bapak Afif Musthofa Kawwami, M.Sos
12. Pembimbing Akademikku bapak M Mifta Farid, M.Ikom.

13. Bapak Erik Dermawan, M.HI yang membimbing dan membantu saya dari awal.
14. Teman-teman dekatku M Ariyanto, Aprin Yandi, Ridho Perkasa dan yang lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
15. Teman-teman kelasku Ilmu Politik 3.
16. Teman-teman angkatan 2016.
17. Almamaterku Uin Raden Fatah Palembang.
18. Orang-orang yang berada di luar sana yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas dan menganalisis faktor penyebab golput di Kota Palembang dan usaha antisipasi oleh KPU Kota Palembang pada Pilpres tahun 2019, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian ini, karena dalam pelaksanaan pemilu masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya atau yang sering di sebut golput saat pemilihan Presiden dan Wakil Presiden khususnya masyarakat Kota Palembang. Dengan melihat keadaan ini peneliti mencoba meneliti bagaimana keadaan golput di Kota Palembang serta mencari faktor penyebab golput serta strategi KPU Kota Palembang dalam mengurangi tingkat partisipasi golput. Teori yang digunakan dalam menjelaskan permasalahan golput di Kota Palembang adalah Teori Partisipasi Politik dengan menggunakan pendekatan teori-teori partisipasi politik dan menjelaskan berdasarkan faktor yang mempengaruhi Partasipasi Politik. Adapun metodologi penelitian yang digunakan adalah metode Kualitatif Deskriptif dengan informan masyarakat di Kota Palembang. Faktor latar belakang sosial ekonomi seperti pendidikan, pekerjaan, keadaan ekonomi sangat memberikan pengaruh masyarakat melakukan tindak golput di Kota Palembang. Faktor rasional, faktor psikologis, faktor tingkat kepercayaan, faktor kesadaran politik, turut mempengaruhi masyarakat untuk tidak ikut serta dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat masih kurang kesadaran politik dan mulai berkurangnya rasa kepercayaan terhadap calon Presiden dan Wakil presiden akibat sering menerima janji-janji yang tidak dilaksanakan. Hal ini yang membuat masyarakat melakukan tindak golput Pada saat pemilihan Presiden dan wakil Presiden tahun 2019.

Kata Kunci: Faktor, Golput, Strategi, KPU, Partisipasi, Pemilu

ABSTRACT

This research discuss and analyze the factors that cause abstentions in Palembang City and anticipation efforts by the Palembang City Election Commission in the 2019 Presidential Election, researchers are very interested in conducting this research, because in the election implementation there are still many people who do not use their voting rights or are often mentioned abstentions during the election of the President and Vice President, especially the people of Palembang City. By looking at this situation the researchers tried to examine how the state of abstentions in Palembang City and look for factors that cause abstentions and the KPU strategy of the City of Palembang in reducing the level of abstentions participation. The theory used in explaining abstentions problems in Palembang is Political Participation Theory using approaches to political participation theories and explaining based on factors that influence Political Participation. The research methodology used is descriptive qualitative method with community informants in the city of Palembang. Factors of socioeconomic background such as education, employment, economic conditions greatly influence the community doing abstentions in Palembang. Rational factors, psychological factors, trust level factors, political awareness factors, also influence the community not to participate in society. This is because the public still lacks political awareness and begins to decrease their trust in the candidates for President and Vice President because they often receive promises that are not implemented. This is what makes people do abstentions during the election of President and Vice President in 2019.

Keywords: Factors, Abstentions, Strategies, KPU, Participation, Elections

DAFTAR ISI

Halaman judul	
Halaman Nota Persetujuan Pembimbing	ii
Pengesahan Skripsi Mahasiswa.....	iii
Halaman Pernyataan	iv
Halaman Motto Dan Persembahan.....	v
Abstrak	vii
Abstrack	viii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel	xii
Daftar Bagan	xiii
Kata Pengantar	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Kerangka Teoritis.....	13
G. Metodologi Penelitian	22
1. Metode Penelitian.....	22
2. Data Dan Sumber Data.....	23
3. Teknik Pengumpulan Data.....	24
4. Lokasi Penelitian.....	26

5. Teknik Analisis Data.....	26
H. Sistematika Penulisan Laporan	28

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.....	30
1. Keadaan Geografi.....	30
2. Wilayah Administratif.....	31
3. Kependudukan.....	33
4. Ketenagakerjaan.....	35
B. Pemilihan Umum Pada Pilpres 2019.....	36
C. Penyelenggara Pemilihan Umum.....	39
D. KPU Kota Palembang	46
E. Visi dan Misi KPU Kota Palembang	51
F. Dasar Hukum	51

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Keberadaan Golput Di Kota Palembang	54
B. Faktor penyebab Golput Di Kota Palembang	58
1. Faktor Psikologis.....	58
2. Faktor Sosial Ekonomi.....	64
3. Faktor Rasional	70
4. Faktor Tingkat Kepercayaan	74
5. Faktor Kesadaran Politik.....	76
C. Strategi KPU Kota Palembang Mengurangi Angka Golput	80

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	82
---------------------	----

B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	101

DAFTAR TABEL

Tabel.1.1 Data Golput Di Kecamatan Kota Palembang	4
Tabel 2.1 Luas Setiap Kecamatan di Kota Palembang	31
Tabel 2.2 Jumlah Kelurahan, Rukun Warga, Rukun Tetangga dan Keluarga Menurut Kecamatan di Kota Palembang	33
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Kota Palembang Menurut Jenis Kelamin	34
Tabel 2.4 Jumlah Angkatan kerja di Kota Palembang.....	36
Tabel 2.5 Jumlah DPT pada Pilpres 2019 di Kota Palembang	39
Tabel 2.6 Anggota KPU Kota Palembang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019	50
Tabel 2.7 Anggota Sekretaris KPU Kota Palembang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.....	50
Tabel 3.1 Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Angkatan Kerja Tahun 2018	64
Tabel 3.2 Hasil Wawancara Mengenai Faktor Golput Dengan Masyarakat Kota Palembang Di Setiap Kecamatan	78

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran.....	21
-----------------------------------	----

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena limpahan rahmat, karunia dan hidayahnyalah saya dapat menyelesaikan skripsi saya dengan judul **Golongan Putih (Golput) Di Kota Palembang Pada Pilpres Tahun 2019 (Analisis Faktor Penyebab Dan Strategi KPU Kota Palembang Dalam Mengurangi Angka Golongan Putih)**. Shalawat serta salam tidak lupa saya curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sebagai Uswatun Hasanah dalam meraih kesuksesan di dunia dan akhirat.

Skripsi ini dibuat sebagai persyaratan guna mendapatkan gelar sarjana pada program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-sebesarnya kepada:

1. Prof. Dr.H. M. Sirozi, MA, Ph.D selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menimba ilmu di UIN Raden Fatah Palembang.
2. Bapak Prof. Dr. Izomiddin, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Dr. Yenrizal, M. Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Ainur Ropik, M. Si, selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang

5. Bapak Kun Budianto, M. Si, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang.
6. Dr. Ahmad Syukri, M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik UIN Raden Fatah Palembang.
7. Afif Musthofa Kawwami, M.Sos selaku Sekretaris Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik UIN Raden Fatah Palembang dan selaku penguji II yang selalu membantu dalam memberikan saran dan masukan dalam skripsi yang di buat oleh peneliti.
8. Taufik Akhyar, M.Si selaku Penguji I yang selalu membantu dalam memberikan saran dan masukan dalam skripsi yang di buat oleh peneliti.
9. Dr. Andi Candra Jaya, S.Ag, M. Hum selaku pembimbing I yang selalu memberikan saran dan masukan dalam skripsi yang dibuat oleh peneliti.
10. Raegen Harahap, M. A selaku pembimbing II yang selalu membantu dan memberi arahan dalam perbaikan dan penulisan dalam pembuatan skripsi.
11. Erik Dermawan, S.IP., M.H.I selaku pembimbing proposal dan banyak meluangkan waktu untuk memotivasi dan memberikan saran serta arahan dari awal penulis membuat skripsi.
12. Dosen-dosen dan Staf/Pegawai Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang yang telah memberikan banyak ilmu selama proses perkuliahan
13. Orang tua, saudara, dan keluarga yang tidak pernah berhenti memberikan doa serta dukungan bagi penulis

14. Staf dan Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan yang telah membantu dalam mengumpulkan data yang namanya tidak bisa disebut satu persatu.
15. Staf dan Anggota KPU Kota Palembang yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data yang namanya tidak bisa disebut satu persatu.
16. Staf dan Anggota Kesbangpol dan Limnas Kota Palembang yang membantu dalam mengumpulkan data yang namanya tidak bisa disebut satu persatu.
17. Sahabat-sahabatku dan teman dekat yang senantiasa meluangkan waktu untuk menyemangati penulis yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu
18. Teman-teman seperjuangan Prodi Ilmu Komunikasi dan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang yang tak bisa peneliti sebutkan satu-persatu.
19. Semua informan dan pihak yang membantu peneliti yang tidak dapat di sebutkan satu persatu

Peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan penelitian ini, kritik dan saran yang membangun peneliti harapkan guna kesempurnaan penulisan penelitian ini. Peneliti juga berharap agar penulisan penelitian ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Palembang, 5 Maret 2020

Rico Miranda Syahputra
16270201

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan hak-hak individu dalam dunia demokrasi telah dibahas oleh Charles Costello dalam konteks kontemporer, dimana demokrasi merupakan suatu sistem sosial serta politik pemerintahan sendiri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi oleh hukum serta kebiasaan dalam melindungi hak-hak individu warga negara. Disamping itu juga, dalam demokrasi terdapat pengakuan terhadap kehendak rakyat yang dijadikan sebagai landasan dalam legitimasi serta kewenangan pemerintahan (kedaulatan rakyat). Kehendak tersebut nantinya akan dituangkan dalam suatu iklim politik terbuka, yaitu dengan melaksanakan pemilihan umum yang diadakan secara bebas dan berkala. Tiap-tiap warga negara memiliki hak untuk memilih pihak-pihak yang akan memerintah serta juga dapat menurunkan pemerintahan yang sedang berjalan kapanpun mereka mau.

Nilai hak-hak individu *demokratis* adalah adanya pelibatan masyarakat yang begitu besar dalam perencanaan maupun pelaksanaan pemilihan umum. Salah satu nilai dari hak-hak individu tersebut adalah partisipasi politik masyarakat (pemilih) yang merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi. Oleh karena itu, dunia demokrasi, partisipasi politik sangat berpengaruh terhadap legitimasi oleh masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan.

Pemilihan Umum menjadi salah satu organ penting dalam demokrasi dalam menjembatani aspirasi baik masyarakat secara umum dan pemerintah.

Dalam hal ini, lembaga pemerintah perlu melakukan adanya sosialisasi kepada khalayak umum untuk mencari keinginan rakyat, sehingga akan tercapai *simbiosis mutualisme* dalam berdemokrasi nantinya.

Asas hukum Pilpres 2019 adalah Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Salah satu *point* penting Undang-undang ini adalah bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 % dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 % dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR. Peraturan tersebut menghasilkan dua pasangan calon yaitu Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan Pasangan Joko Widodo-Maruf Amin pada Pemilu tahun 2019.

Dalam pemilihan umum partisipasi politik merupakan hal yang sangat penting.¹ Dimana pengertian partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut dalam kehidupan politik dengan jalan memilih pemimpin. Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga negara untuk mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembuatan kebijakan umum.² Melalui pemilihan umum, rakyat diberi kesempatan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang dikehendaki sebagai penyambung dan *fasilitator* seluruh aspirasi masyarakat pemerintahan Baik melalui Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota ataupun lembaga Legislatif (DPR RI, DPD, DPRD Povinsi dan DPRD Kabupaten/kota).

¹ Gaffer, 2012: 36

² Miriam Budiarmo, (dalam Cholisn 2008:367)

Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam tergantung dengan tingkat partisipasi politik masing-masing. Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28 yaitu “kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Kualitas pemilu dalam suatu pemilihan umum dapat terlihat dari jumlah partisipasi pemilih. Semakin tinggi partisipasi pemilih dalam pemilu sesungguhnya menunjukkan arah demokrasi yang lebih modern. *Realitas* partisipasi politik tersebut memberikan legitimasi politik pemenang pemilu yang begitu besar dan memberikan gambaran besar kepercayaan rakyat melalui *instrumen* pemilihan umum. Selaras dengan hal tersebut, tingginya tingkat partisipasi dalam pemilihan umum juga menunjukkan bahwa rakyat memahami masalah-masalah politik dan ingin terlibat dalam kegiatan politik.

Partisipasi yang rendah dapat diasumsikan bahwa masyarakat tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan dapat juga diasumsikan rendahnya partisipasi sebagai ketidakpercayaan rakyat terhadap hasil pemilihan umum yang akan membawa perubahan. Fenomena diatas sering disebutkan sebagai golput dalam masa pemilihan umum. Fenomena golput tersebut sering juga dianggap sebagai ancaman demokrasi, karena dinilai tidak mendukung adanya pesta demokrasi.

Pada pengertiannya golput secara luas mengacu kepada orang-orang yang telah memenuhi syarat dan boleh ikut serta dalam Pemilihan Umum dan terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) tetapi tidak memilih atau *abstain* dalam pemilihan umum. Parameter golput bukan hanya pertimbangan *ideologis*, namun adanya berbagai alasan yang *logis* seperti masalah *administratif* contohnya tidak memperoleh undangan memilih, sakit keras, bepergian, tekanan dari pihak lain dan *apatis* terhadap hak politiknya.

Fenomena golput dari pertama kali pemilihan umum sudah bukan cerita baru, tetapi sudah menjadi cerita pelengkap dari pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia baik Pilpres, PILKADA yang sudah lama terlaksanakan. Salah satu kota yang mengalami tingkat golput pada masa pilpres 2019 lalu terjadi di kota Palembang. Bahkan golput di kota Palembang mencapai 19,3 % yang diidentifikasi sebagai angka cukup besar dalam tingkat golput.

Tabel.1.1
Data Golput Di Kecamatan Kota Palembang.

No	Kecamatan kota Palembang	Jumlah pemilih Dpt	Jumlah orang yang golput	Persentasi golput
1	Alang alang Lebar	60.193	7.661	12,7 %
2	Bukit Kecil	34.416	10.723	31,1%
3	Gandus	45.790	6.819	14,8 %
4	Iilir Barat 1	98.252	19.301	19,6 %
5	Iilir Barat 2	47.142	8.407	17,8 %
6	Iilir Timur 1	53.617	13.662	25,4%
7	Iilir Timur 2	63.805	20.243	31,7 %
8	Iilir Timur 3	55.268	11.847	21,4 %
9	Jakabaring	58.891	11.402	19,3 %
10	Kalidoni	80.176	13.652	17,0 %
11	Kemuning	58.378	11.389	19,5 %
12	Kertapati	52.704	325	0,61 %

13	Plaju	67.096	12.789	19,0 %
14	Sako	65.565	10.398	15,8 %
15	Sebrang Ulu 1	61.728	11.893	19,2 %
16	Sebrang Ulu 2	66.260	30.217	45,6 %
17	Semantang Borang	35.292	9.019	25,5 %
18	Sukarami	111.514	18.627	16,7 %
Jumlah		1.126.087	217.771	19,3 %

Sumber: KPU Kota Palembang.

Pada pilpres 2019 di kota Palembang tingkat partisipasi pada masyarakat sudah baik tapi masih banyak juga yang melakukan tindakan golput. Tingkat golput di Kota Palembang mencapai 19,3 % dengan jumlah DPT Sebesar 1.126.087 orang dan orang yang melakukan pencoblosan sebesar 908.316 orang yang artinya jumlah golput mencapai 217.771 orang. Dengan kata lain, banyak masyarakat yang tidak ikut serta dalam partisipasi pemilihan umum.

Dari penjelasan diatas, membuat peneliti berkeinginan kuat untuk menganalisa permasalahan-permasalahan terhadap penyebab masyarakat tidak ikut berpartisipasi pada Pilpres tahun 2019. Disamping itu juga, peneliti akan mencari faktor penyebab terjadinya golput di Kota Palembang pada Pilpres 2019 serta strategi KPU Kota Palembang dalam mengurangi angka golput pada Pemilihan umum selanjutnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat peneliti kemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya golput di Kota Palembang pada Pilpres tahun 2019 ?

2. Bagaimana strategi KPU Kota Palembang dalam mengurangi Angka golput pada Pilpres tahun 2019 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui faktor penyebab terjadinya golput di Kota Palembang pada Pilpres 2019
2. Mencari tahu strategi KPU Kota Palembang dalam mengurangi angka golput pada Pilpres tahun 2019

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis Hasil penelitian bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan pembaca mengenai kajian politik, khususnya yang berkaitan dengan teori/pendekatan Faktor penyebab golput dalam pemilu di Kota Palembang.

2. Secara Praktis Manfaat hasil penelitian ini memberikan gambaran dan penjelasan mengenai penyebab perilaku golput masyarakat di Kota Palembang dalam pemilihan presiden dan wakil presiden Tahun 2019. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan input terhadap implementasi pemilu oleh stakeholders pemilu yaitu KPU Kota Palembang serta sebagai bahan untuk perumusan kebijakan manajemen pemilu di Kota Palembang, serta partai politik dan kandidat yang akan maju pada pemilihan mendatang agar dapat mencari

solusi terkait perilaku tidak memilih atau golput masyarakat Kota Palembang sehingga jumlahnya dapat berkurang pada pemilihan mendatang.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan kegiatan penelitian ini, peneliti melihat beberapa peraturan yang terkait dengan judul peneliti yaitu: Golongan Putih (Golput) Di Kota Palembang Pada Pilpres Tahun 2019 (Analisis Faktor Penyebab Dan Strategi KPU Kota Palembang Dalam Mengurangi Angka Golongan Putih). untuk mempermudah dalam penelitian.

Pertama, Berdasarkan UUD 1945 Bab I Pasal 1 ayat (2) kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam demokrasi modern yang menjalankan kedaulatan itu adalah wakil-wakil rakyat yang ditentukan sendiri oleh rakyat. Untuk menentukan siapakah yang berwenang mewakili rakyat maka dilaksanakan pemilihan umum.

Pemilihan umum adalah suatu cara memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat serta salah satu pelayanan hak-hak asasi warga negara dalam bidang politik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum dinyatakan bahwa pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.³

³ <https://www.dpr.go.id/>

Pemilihan umum merupakan salah satu hak asasi warga negara yang sangat *prinsipil*. Karenanya dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Sesuai dengan asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semuanya itu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya.

Berdasarkan pengertian di atas bahwa pemilu adalah sarana mewujudkan pola kedaulatan rakyat yang demokratis dengan cara memilih wakil-wakil rakyat, Presiden dan Wakil Presiden serta kepala daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Kedua, Berdasarkan Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa tahun 1945, Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil:

a. Langsung, Yaitu rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

b. Umum, Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 tahun atau telah pernah kawin, berhak ikut memilih dalam pemilu. Warga negara yang sudah berumur 21 tahun berhak dipilih dengan tanpa ada *diskriminasi* (pengecualian).

c. Bebas, Setiap warga negara yang memilih menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun/dengan apapun. Dalam melaksanakan haknya setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

d. Rahasia, Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan cara apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya akan diberikan.

e. Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu setiap penyelenggara/pelaksana pemilu, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas, dan pemantau pemilu, termasuk pemilih serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Adil, Berarti dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilih dan parpol peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, DPRD dan Pilpres tahun 2019 yang diselenggarakan secara serentak. Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada -asas sebagaimana dimaksud, dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.⁴

Dalam melakukan kegiatan penelitian ini, peneliti juga menganalisis terhadap penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan terhadap judul penelitti

⁴ <https://setkab.go.id/>

yaitu: Golongan Putih (Golput) Di Kota Palembang Pada Pilpres 2019 (Analisis Faktor Penyebab Dan Strategi KPU Kota Palembang Dalam Mengurangi Angka Golongan Putih) yang telah banyak dibahas oleh beberapa peneliti sebelumnya dan memiliki perbedaan terhadap penelitian yang akan dibahas oleh peneliti, antara lain yaitu:

Pertama, peneliti Arie Setiawan dengan judul *Perilaku Golput Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Waringin Barat Kecamatan Sukorojo Kabupaten Prengsewu*, dengan menggunakan Metode Penelitian Kualitatif, Peneliti menjelaskan hal menjadi penyebab masyarakat tidak memilih disebabkan faktor faktor teknis seperti harus bekerja, libur, dan harus kuliah. Dan faktor kedua adalah faktor politis dimana masyarakat menilai keadaan desa akan sama saja dan siapapun kepala desa tidak akan mengubah keadaan itu

Kedua, Peneliti Rike Prisina dengan Judul *Fenomena Golongan Putih di Kalangan Mahasiswa Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2011*. dengan menggunakan Metode Penelitian Kualitatif, Peneliti menjelaskan menjelaskan Mahasiswa yang melakukan golput termasuk dalam tipe idiealis konfrontatif, idiealis realis, oportunis, professional, glamour. Perilaku golput mahasiswa pada penelitian ini termasuk ke dalam golput teknis dan golput politis tetapi bukan termasuk ke dalam kategori golput ideologis.

Ketiga, Peneliti Dendi Wansah Solin dengan Judul *Faktor Penyebab Tingginya Golput Pada Pilpres Tahun 2014 Di Masyarakat Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Terkait Fatwa Mui Tentang Golput*. Dengan menggunakan Metode Penelitian Kualitatif, peneliti menjelaskan Masih banyak

masyarakat di Kecamatan Gunung Meriah yang tidak menggunakan hak suaranya dari jumlah pemilih tetap (DPT) sebanyak 24,016 jiwa sedangkan yang menggunakan hak pilihnya hanya sebanyak 14,743 jiwa dan yang tidak menggunakan hak pilihnya itu sebanyak 9273 jiwa.

Artinya golput di Kecamatan Gunung Meriah ini sangatlah tinggi, dimana sebagai faktor penyebabnya, di antaranya adalah sebagai berikut: Adanya agenda lain pada hari “H” pencoblosan yang tidak bisa dihindari bagi masyarakat sehingga mereka tidak dapat ikut untuk memilih pada saat pemilihan. Adanya sikap pesimis terhadap siapapun yang akan terpilih menjadi pemimpin, masyarakat menganggap kehidupan mereka tetap tidak terjadi perbaikan. Masyarakat kurang menaruh simpati terhadap pilpres ini, karena masyarakat berpikir presiden ini terlalu jauh dari mereka berbeda dengan PILEG dan PILKADA.

Mengenai fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang golput di Kecamatan Gunung Meriah itu masih belum tersosialisasikan kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui fatwa tersebut. Dan tingkat partisipasi masyarakat setelah adanya fatwa MUI tersebut belum juga mampu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, karena masyarakat menganggap bahwa memilih itu adalah merupakan hak diri mereka sendiri.

Kempat, Peneliti Rizki Pranata dengan judul *Faktor-Faktor Penyebab Golput Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015 (Studi Pada Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung)*. Dengan menggunakan Metode Penelitian Kuantitatif, peneliti

menjelaskan Faktor-faktor penyebab golput berpengaruh terhadap golputnya masyarakat Kampung Baru pada pemilihan walikota dan wakil walikota Bandar Lampung tahun 2015 di kelurahan Kampung Baru, kecamatan Labuhan Ratu, kota Bandar Lampung. Arah korelasi yang terjadi adalah positif artinya semakin besar pengaruh faktor-faktor penyebab golput yang terjadi pada diri seorang golput maka golputnya cenderung semakin besar.

Golput dalam penelitian ini merupakan orang atau masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan namun tidak menggunakan hak pilihnya dengan alasan sengaja serta tujuan yang jelas atau sebagai wujud protes politik terkait rasa ketidakpuasan sebagai pemilih disebabkan kepribadian serta orientasi kepribadian pemilih, sistem dan objek politik yang ada disekitarnya serta kalkulasi untung dan rugi. Faktor kepercayaan politik muncul akibat dari ketidakpercayaan seorang yang golput terhadap saluran politik dalam bentuk kandidat atau partai politik.

Kelima, peneliti Muhammad Rabbani dengan Judul *Fenomena Golongan Putih Di Kota Makassar Pada Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2013*. Dengan menggunakan Metode Penelitian kualitatif dengan metode penelitian Pustaka, Peneliti menjelaskan bahwa Keberadaan golongan putih (Golput) di kota Makassar khususnya pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Sulawesi selatan 2013 sangat memprihatinkan.

Di lokasi penelitian di kecamatan Tamalanrea ditemukan dua kategori golput berdasarkan alasan dan sebab mereka tidak menggunakan hak suaranya ,

yang pertama yaitu kategori masyarakat golput pragmatis , karena mereka apatis akan sistem pemilu yang berjalan pada saat ini dengan asumsi yang terbangun suara yang dimiliki tidak terlalu berpengaruh terhadap hasil pemilu, Sedangkan ke dua yaitu sebagian masyarakat golput politis, masyarakat yang tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau pesimistis bahwa pemilu/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan, mereka mengaku tidak ada satupun kandidat yang sesuai dengan harapannya dan karena itu tak mau mencoblos .

Selain itu faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya Golongan putih (Golput) pada masyarakat di Kota Makassar Pada Pilkada 2013 sehingga menimbulkan suatu fenomena golput yaitu Faktor Sosial Ekonomi, Faktor Psikologis, Faktor Rasional.

F. Kerangka Teoritis

Secara teoritis Pendekatan yang bisa dilakukan untuk mengetahui mengapa orang tidak memilih adalah melalui pendekatan teori-teori partisipasi politik. Penjelasan ini memusatkan perhatian pada individu.berdasarkan faktor yang mempengaruhi partisipasi politik.

Partisipasi politik adalah kegiatan Warga Negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan. kegiatan yang dimaksud, antara lain, mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik dan koreksi atas pelaksanaan suatu kebijakan umum, dan mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu, mengajukan alternatif

pemimpin, dan memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum.

Dalam hal ini, partai politik mempunyai fungsi untuk membuka kesempatan, mendorong, dan mengajak para anggota dan anggota masyarakat yang lain untuk menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan mempengaruhi proses politik. jadi, partai politik merupakan wadah partisipasi politik, fungsi ini lebih tinggi posisinya dalam sistem politik demokrasi daripada dalam sistem politik *totaliter* karena sistem politik yang terakhir ini lebih mengharapkan ketaatan dari para warga daripada aktivitas mandiri.⁵

Partisipasi menurut Ramlan Surbakti, merupakan salah satu aspek penting demokrasi. asumsi yang mendasari demokrasi dan partisipasi adalah orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri, berikut sejumlah rambu-rambu dalam partisipasi politik. *pertama*, partisipasi yang dimaksudkan berupa kegiatan atau perilaku luar individu warga negara biasa yang dapat diamati, bukan perilaku dalam yang berupa sikap dan orientasi. *kedua*, kegiatan itu diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik. *ketiga*, baik kegiatan yang berhasil (efektif) maupun yang gagal mempengaruhi pemerintah termasuk dalam konsep partisipasi politik. *keempat*, kegiatan mempengaruhi pemerintah tanpa menggunakan perantara individu dapat dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung.⁶

Ahli lain menyebutkan tentang pengertian partisipasi politik menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, kegiatan warganegara preman (*private*

⁵ Ramlan surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (2010), Jakarta Pt : Gramedia Widiasarana Indonesia, hal 151

⁶ *Ibid.* hal 179-181

citizen) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.⁷ dalam hal ini ada yang perlu di catat bahwa aspek penting yaitu, *pertama* Huntington dan Nelson mengartikan partisipasi politik hanyalah mencakup keyakinan-keyakinan dan bukan sikap-sikap. dalam hal ini, mereka tidak memasukan sikap dan perasaan tersebut berkaitan dengan bentuk tindakan politi. *Kedua*, yang di maksud dengan partisipasi politik adalah warga negara biasa, bukan pejabat-pejabat pemerintah, pejabat-pejabat partai, calon-calon politik, dan lobbyist professional yang bertindak dalam hal-hal itu.

Ketiga, kegiatan yang dimaksudkan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pemerintah. kegiatan yang dimaksudkan misalnya membujuk atau menekan pejabat pemerintah untuk bertindak dengan cara-cara tertentu untuk mengubah keputusan. *keempat*, kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pemerintah, tak peduli apakah kegiatan itu benar-benar mempunyai efek. Dalam buku *Internasional Ensiklopedia of the Social Sciences*⁸. partisipasi politik mengacu pada kegiatan publik massa dalam politik, termasuk misalnya, pemungutan suara dalam pemilihan, membantu kampanye politik, memberi uang kepada kandidat atau menyebabkan, menulis atau menelpon pejabat, petisi, boikot peragaan, dan bekerja dengan orang lain dalam masalah.

Resenstone dan hansen dalam *Internasional Ensiklopedia of the Social Sciences* menjelaskan perkembangan teoritis dalam penelitian ini partisipasi yang melibatkan penggabungan anggapan bahwa orang lebih cenderung untuk

⁷ Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson.(1984). *Partisipasi Politik Tidak Ada Pilihan Mudah*, Jakarta: PT Sangkala Puser, hal. 4

⁸ William a. Darity Jr.(2008).*Internasional Ensiklopedia of the Social Science*.USA :course technologi, hal. 1178

berpartisipasi ketika mereka di minta untuk melakukannya (direkrut atau dimobilisasi) dan lebih lagi mobilisasi mengikuti pola sistematis. mereka menggunakan ide ini dalam studi mereka tentang partisipasi di Amerika Serikat dari tahun 1956-1990.⁹

Dalam pengertian tersebut partisipasi politik lebih berfokus pada ekspresi politik seseorang ataupun sekelompok masyarakat untuk ikut serta secara aktif, seperti memilih pemimpin negara ataupun upaya-upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah. seperti yang di lakukan sekelompok masyarakat di kota Palembang yang ikut serta secara aktif memilih pemimpin, sehingga kota Palembang tersebut mendapat tingkat partisipasi yang tinggi lewat sebuah ekspresi politiknya.

Dalam model partisipasi politik, faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pertama, ialah kesadaran politik. *kedua*, kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik). yang dimaksud kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup yang dimaksud dengan sikap dan kepercayaan kepada pemerintah ialah penilaian seseorang terhadap pemerintah, apakah seseorang menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak.¹⁰

Selain itu ada faktor yang berdiri sendiri (bukan variable *independen*). Artinya bahwa rendah kedua faktor itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti

⁹ *Ibid*, hal 1180

¹⁰ Ramlan Surbakti. (2007). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, hal. 144

status sosial, *afiliasi* politik orang tua, dan pengalaman berorganisasi. Yang dimaksud status sosial yaitu kedudukan seseorang berdasarkan keturunan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Selanjutnya status ekonomi yaitu kedudukan seseorang dalam lapisan masyarakat, berdasarkan pemilikan kekayaan. Seseorang yang mempunyai status sosial dan ekonomi tinggi diperkirakan tidak hanya mempunyai pengetahuan politik, akan tetapi memiliki minat serta perhatian pada politik dan kepercayaan terhadap pemerintah.¹¹

Selanjutnya menurut Myron Weimer partisipasi politik di pengaruhi oleh beberapa hal yaitu:

1) Modernisasi Modernisasi disegala bidang akan berimplikasi pada komensialisme pertanian, industrial, meningkatkan arus urbanisasi, peningkatan kemampuan baca tulis, perbaikan pendidikan dan pengembangan media massa atau media komunikasi secara luas.

2) Terjadi perubahan struktur kelas sosial Terjadinya perubahan kelas struktur kelas baru itu sebagai akibat dari terbentuknya kelas menengah dan pekerja baru yang meluas era industrialisasi dan modernisasi.

3) Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa modern Ide-ide baru seperti nasionalisme, liberalisme, membangkitkan tuntutan-tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan suara.

4) Adanya konflik diantara pemimpin-pemimpin politik Pemimpin politik yang bersaing merebutkan kekuasaan sering kali untuk mencapai kemenangannya dilakukan dengan cara mencari dukungan massa.

¹¹ Ramlan Surbakti, 2006:144-145

5) Keterlibatan pemerintah yang semakin luas dalam unsur ekonomi, sosial dan budaya. Meluasnya ruang lingkup aktivis pemerintah ini seringkali merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan organisasi untuk ikut serta dalam mempengaruhi pembuatan keputusan politik.¹²

Sementara itu menurut Milbrath memberikan alasan bervariasi mengenai partisipasi seseorang, yaitu: Pertama, berkenaan dengan penerimaan perangsang politik. Milbrath menyatakan bahwa keterbukaan dan kepekaan seseorang terhadap perangsang politik melalui kontak-kontak pribadi, organisasi dan melalui media massa akan memberikan pengaruh bagi keikutsertaan seseorang dalam kegiatan politik.

Kedua, berkenaan dengan karakteristik sosial seseorang. Dapat disebutkan bahwa status ekonomi, karakter suku, usia jenis kelamin dan keyakinan (agama). Karakter seseorang berdasarkan faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh yang relatif cukup besar terhadap partisipasi politik. Ketiga, yaitu menyangkut sifat dan sistem partai tempat individu itu hidup. Seseorang yang hidup dalam negara yang demokratis, partai-partai politiknya cenderung mencari dukungan massa dan memperjuangkan kepentingan massa, sehingga massa cenderung berpartisipasi dalam politik. Keempat, yaitu adanya perbedaan regional. Perbedaan ini merupakan aspek lingkungan yang berpengaruh terhadap perbedaan watak dan tingkah laku individu. Dengan perbedaan regional itu pula yang mendorong perbedaan perilaku politik dan partisipasi politik.¹³

¹² Mohtar Mas'ood dan Collin MacAndrews (2011:56-57)

¹³ Michael Rush dan Althof (1989:168)

Partisipasi pemilih pemula dalam Pilpres langsung memang erat kaitanya dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Banyak pertimbangan dalam menggunakan hak pilihnya. Bisa melihat dari sisi visi misi kandidat yang bagus meskipun tidak ada jaminan setelah kandidat terpilih. Selain itu berupa acuan yang digunakan untuk memilih adalah mereka kandidat yang memberikan uang, dan kandidat yang diusung oleh partai yang dianggap pemilih pemula sesuai dengan kriterianya. Pada perilaku pemilih yang rasional pemilih akan menentukan pilihannya berdasarkan isu politik dan kandidat yang diajukan serta kebijakan yang dinilai menguntungkan baginya yang akan diperoleh apabila kandidat pilihannya terpilih. Pemilih yang rasional tidak hanya pasif dalam berpartisipasi tetapi aktif serta memiliki kehendak bebas.

Tipologi partisipasi politik menurut Ramlan Surbakti dibedakan menjadi tiga yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif dan golongan putih (golput). Yang termasuk partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan yang dibuat oleh kebijakan pemerintah dan golongan putih (golput) atau kelompok apatis, karena tidak peduli dengan sistem politik yang ada bahkan menyimpang dengan tidak memilih..

Sebaliknya, kegiatan yang termasuk dalam kategori partisipasi pasif berupa kegiatan yang menaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap pelaksanaan pemerintah. di samping itu, terdapat sejumlah anggota masyarakat yang tidak termasuk dalam kedua kategori tersebut karena mereka menganggap masyarakat dan sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa

yang mereka cita-citakan kelompok ini di sebut dengan kelompok apatis atau golongan putih (golput).¹⁴

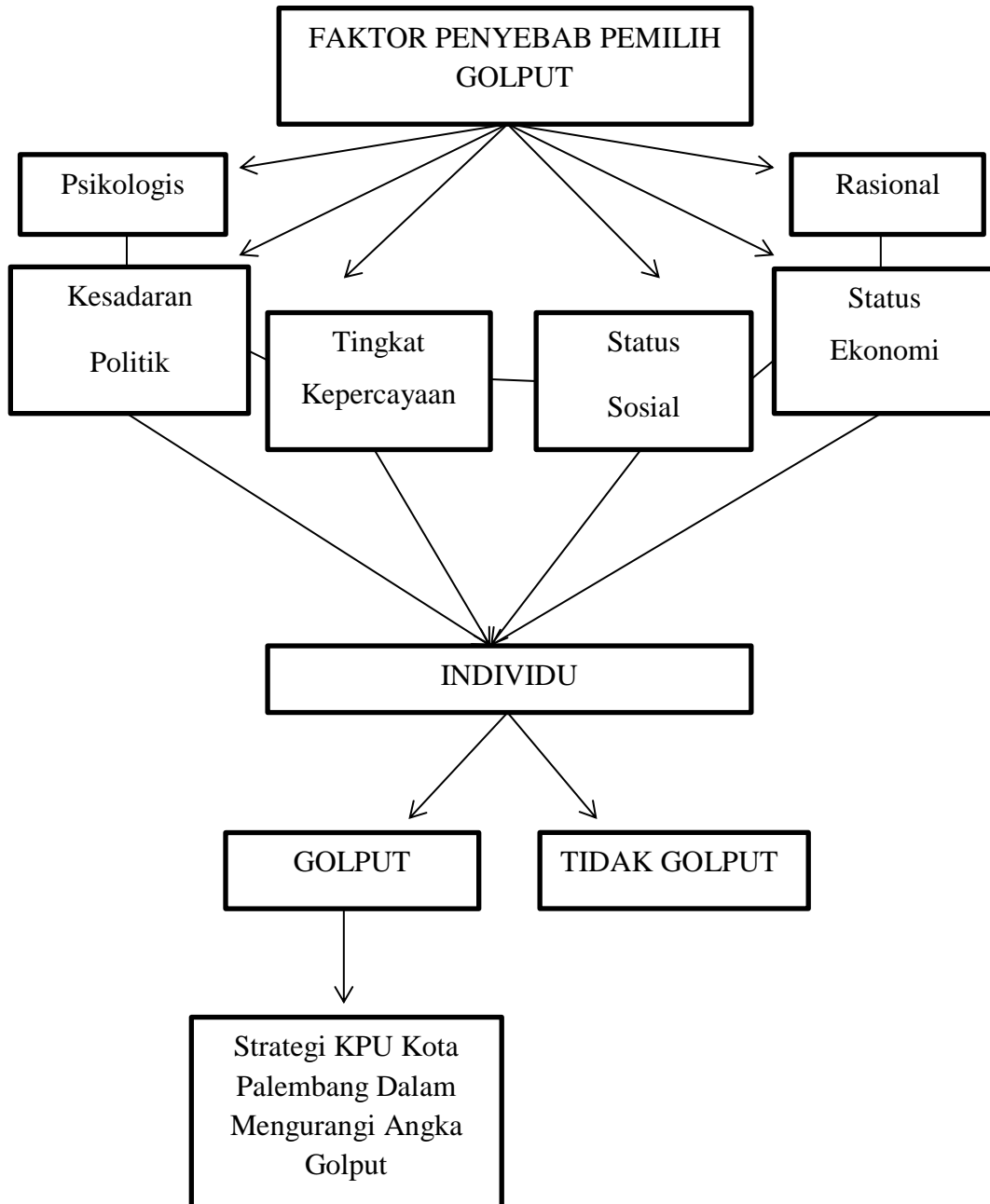
Bentuk- bentuk partisipasi politik di berbagai negara sangat beragam, baik bentuk *konvensional* maupun bentuk *non-konvensional*. Partisipasi politik *konvensional* dan *non-konvensional* adalah bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern, kecuali tindak kekerasan politik baik terhadap manusia maupun harta benda. namun secara umum, ada jenis partisipasi politik yang aktif, misalnya mengajukan usul suatu kebijakan tertentu. selain itu ada pula jenis partisipasi politik yang pasif, misalnya kegiatan yang mentaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan keputusan pemerintah.¹⁵

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori partisipasi dalam *mengidentifikasi* apa yang menjadi faktor terjadinya golput di Kota Palembang pada Pilpres 2019, alasan peneliti mengambil teori Partisipasi karena karena judul peneliti mencari faktor penyebab golput dan teori partisipasi dapat di gunakan dalam menilai faktor yang mempengaruhi partisipasi yang di sebabkan oleh golput, dapat di simpulkan bahwa ada beberapa orang yang tidak ikut serta dalam partisipasi artinya ada suatu faktor yang menyebabkan hal tersebut, oleh karena itu peneliti menggunakan teori partisipasi untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi partisipasi dan menyebabkan tinggi nya tingkat Golput di Kota Palembang pada Pilpres 2019 kota Palembang dan strategi KPU Kota Palembang dalam mengurangi Angka Golput di Kota Palembang.

¹⁴ *Ibid*, hal 142

¹⁵ Tareh Rasyid. (2017). *Pengantar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Idea Press, hal 97

Kerangka Pemikiran



Bagan 1.1 Kerangka Berpikir

Sumber: Diolah Oleh Peneliti berdasarkan teori partisipasi politik

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah cara untuk memecahkan masalah penelitian secara sistematis. Itu mungkin dipahami sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana penelitian dilakukan secara ilmiah. di dalamnya kami mempelajari berbagai hal langkah-langkah yang umumnya diadopsi oleh seorang peneliti dalam mempelajari masalah penelitian bersama dengan logika di belakang mereka, para peneliti perlu mengetahui tidak hanya metode/teknik penelitian tetapi juga metodologi.¹⁶ berikut ini metode yang akan digunakan peneliti di dalam penelitian:

1. Pendekatan/Metode penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menjelaskan faktor penyebab golput yang terjadi Pada saat pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden tahun 2019 dan strategi KPU Kota Palembang dalam mengurangi tingkat partisipasi golput di Kota Palembang yang dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Melalui penelitian deskriptif kualitatif ini, peneliti menggambarkan permasalahan

¹⁶ C.R Kothari, (1990). *Research Methodologi, Methods adan Techniques (Second Revises Edition)*, India: Age International, hal. 8

yang terjadi di Metode Penelitian lapangan sesuai dengan fakta, teori dan konsep berdasarkan data yang didapat.

2. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini terbagi dua yaitu data primer dan data sekunder:

- a. Data primer adalah data yang diterima secara langsung dari orang yang terlibat dalam permasalahan yang sedang diteliti. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari observasi langsung, mengamati dan mencatat segala sesuatu yang menjadi faktor penyebab golput pada Pilpres tahun 2019 dan strategi KPU Kota Palembang dalam mengurangi angka golput .
- b. Data sekunder atau data penunjang adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi.¹⁷ Dokumentasi dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, internet dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian, Golongan Putih (Golput) Di Kota Palembang Pada Pilpres Tahun 2019 (Analisis Faktor Penyebab Dan Strategi KPU Kota Palembang Dalam Mengurangi Angka Golput).

¹⁷ Hasan, (2002: 58)

3. Teknik Pengumpulan data

a. Wawancara

Pada penelitian ini menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab.¹⁸ Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Palembang yang tidak datang ke TPS saat Pilpres berlangsung, adapun kecamatan yang dipilih sebagai sampel yaitu kecamatan yang memiliki angka golput tertinggi dengan informan/sampel yang ditentukan dengan Teknik pengambilan sampel sistem *snowball sampling* (pengambilan sampel seperti bola salju).¹⁹ Didalam teknik ini, pengumpulan data dimulai dari beberapa orang yang memenuhi kriteria untuk dijadikan anggota sample.

Mereka kemudian menjadi sumber informasi tentang orang-orang lain yang juga dapat dijadikan anggota sampel. Orang-orang yang ditunjukkan ini kemudian dijadikan anggota sampel dan selanjutnya diminta menunjukkan orang lain yang memenuhi kriteria menjadi anggota sampel.

Demikian prosedur ini dilanjutkan sampai jumlah anggota sampel yang diinginkan terpenuhi.²⁰ informan golput terdiri dari Individu masyarakat biasa maupun tokoh masyarakat. Data yang diperoleh dari wawancara dianalisis secara kualitatif, sehingga diperoleh data yang akurat mengenai faktor-faktor dan penyebab masyarakat menjadi golput secara mendalam. Adapun yang menjadi

¹⁸ P. Joko Subagyo (2011:39)

¹⁹ Sugiyono (2010:15)

²⁰ Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial, Bandung, PT.Remaja Rodakarya, 1998, hal. 63

informan atau sumber informasi dari penelitian Golongan Putih (Golput) Di Kota Palembang Pada Pilpres Tahun 2019 (Analisis Faktor Penyebab Dan Strategi KPU Kota Palembang Dalam Mengurangi Tingkat Partisipasi Golongan Putih). yaitu KPU Kota Palembang, ketua PPS(Panitia Pemungutan Suara), Ketua PPS(Panitia Pemungutan Suara) tingkat Kelurahan, Masyarakat Kota Palembang, serta orang yang melakukan Tindak golput.

b. Observasi

Selain teknik wawancara, penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode observasi. Teknik observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang di teliti baik secara langsung maupun tidak langsung.²¹ Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian Golongan Putih (Golput) Di Kota Palembang Pada Pilpres Tahun 2019 (Analisis Faktor Penyebab Dan Strategi KPU Kota Palembang Dalam Mengurangi Angka Golongan Putih).

c. Dokumentasi

Secara sederhana dokumentasi adalah catatan kejadian yang sudah lampau yang dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan dan karya bentuk, seperti buku, jurnal, surat kabar, file, foto, video, atau rekaman suara sebagai bahan komunikasi langsung.²² Dokumentasi dalam penelitian ini adalah data yang berbentuk buku, jurnal, dan data lain yang berhubungan dengan Golongan Putih (Golput) Di Kota Palembang Pada Pilpres Tahun 2019 (Analisis Faktor Penyebab Dan Strategi KPU Kota Palembang Dalam Mengurangi Angka Golongan Putih).

²¹ Riduwan (2004: 104)

²² Sugiyono (2015: 329)

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian yang merupakan tahap sangat penting dalam penelitian kualitatif. Karena dengan ditetapkan lokasi penelitian berarti objek dan tujuan bisa ditetapkan sehingga mempermudah peneliti melakukan penelitiannya.

Adapun lokasi penelitian yang peneliti lakukan di Kota Palembang .Sedangkan fokus dari penelitian ini adalah golput di Kota Palembang pada Pilpres 2019 serta analisis faktor penyebab dan Strategi KPU Kota Palembang dalam mengurangi angka golput.

5. Teknik Analisis data

Analisis data adalah adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikanya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar dari data hasil penelitian agar lebih mudah dipahami pembaca secara umum.²³ Teknik analisa data yang peneliti gunakan didalam penelitian ini, antara lain menggunakan empat tahapan sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Data dalam penelitian “Golongan Putih (Golput) Di Kota Palembang Pada Pilpres Tahun 2019 (Analisis Faktor Penyebab Dan Strategi KPU Kota Palembang Dalam Mengurangi Angka Golongan Putih).” diperoleh melalui wawancara peneliti kumpulkan dalam bentuk transkrip, peneliti melakukan wawancara secara lisan dalam bentuk rekaman peneliti konfrensi menjadi catatan-catatan wawancara atau transkrip, dan di tambah dengan data hasil observasi

²³ Ardhana12 (dalam Lexy J. Moleong 2002: 103)

peneliti kumpulkan dalam catatan hasil observasi secara langsung, serta dokumentasi peneliti kumpulkan berupa dokumen-dokumen. Hasil dari data yang diperoleh tersebut kemudian dicatat dan dikumpulkan.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan pengubahan data kasar yang muncul dari catatan tertulis yang dihasilkan ketika berada di lapangan.²⁴ Bila proses ini dilakukan di akhir penelitian, akan semakin banyak informasi yang harus disaring. Pada tahap ini, peneliti menyaring informasi yang di dapat dari informan, dan informasi yang peneliti observasi secara langsung, serta dokumentasi sesuai dengan permasalahan yang terjadi Tentang golput di Kota Palembang Pada Pilpres tahun 2019, analisis faktor penyebab dan strategi KPU Kota Palembang dalam mengurangi angka golput yang akan diteliti.

c. Penyajian Data

Penyajian data berupa aktivitas menyajikan data hasil penelitian sehingga memungkinkan peneliti mengambil keputusan sementara dan dapat merencanakan tindakan berikutnya bila ternyata masih terdapat data yang tidak lengkap, perlu klarifikasi, atau sama sekali belum di peroleh.²⁵ Penyajian data cenderung mengarah pada penyederhanaan data kompleks keadaan kesatuan bentuk yang sederhana dan selektif sehingga mudah untuk dipahami.

²⁴ Daymon dan Holloway (2008, hlm.369)

²⁵ Sugiyono (2013, hlm.245)

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan proses aktivitas merumuskan simpulan berdasarkan dua aktivitas sebelumnya yaitu data yang telah direduksi atau yang telah disajikan.²⁶ Pada tahap ini peneliti bertugas menggambarkan makna dari data yang telah disajikan. Kesimpulan ini berisi deskripsi atau gambaran dari permasalahan yang diteliti, sehingga tidak terjadi kesalahan makna dalam kesimpulan tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, peneliti membagi sistematika penulisan kedalam empat bab, yaitu:

BAB I. Pada bab pertama diuraikan tentang pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian yang didalamnya terdapat tipe penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik analisa data, sistematika penulisan laporan.

BAB II. Pada bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian terhadap Golongan Putih (Golput) Di Kota Palembang Pada Pilpres Tahun 2019 (Analisis Faktor Penyebab Dan Strategi KPU Kota Palembang Dalam Mengurangi Angka Golongan Putih). dan Lokasi dari penelitian ini adalah Kota Palembang. Tetapi, fokus dari penelitian ini adalah faktor penyebab golput pada

²⁶ T Miles dan Huberman (1992:15-19)

Pilpres 2019 serta strategi KPU Kota Palembang dalam mengurangi angka golongan putih.

BAB III. Pada bab ini membahas tentang hasil dan pembahasan mengenai analisis dan pemaknaan dari data yang di peroleh. Selanjutnya dari penelitian yang peneliti dapat akan di analisa dengan teori Partisipasi politik.

BAB IV. Pada bab ini merupakan bagian penutup. Terdiri dari kesimpulan dan saran yang merupakan rangkuman dari keseluruhan hasil penelitian.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Penetapan lokasi penelitian yang merupakan tahap sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkan sehingga mempermudah peneliti melakukan penelitiannya. Sedangkan fokus dari penelitian ini adalah analisis faktor penyebab dan strategi KPU Kota Palembang dalam mengurangi angka golongan putih.

1. Keadaan Geografi

Kota Palembang terletak antara 2o52' sampai 3o5' Lintang Selatan dan 104o37' sampai 104o52' Bujur Timur. Pada Tahun 2007 Kota Palembang dibagi 16 kecamatan dan 107 kelurahan. Pada Tahun 2018, berdasarkan SK Nomor 136/4123/BAK, terbentuk Kecamatan Jakabaring yang merupakan pemekaran dari Kecamatan seberang Ulu I dan Kecamatan Ilir timur Tiga yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Ilir timur II, sehingga saat ini wilayah administrasi Kota Palembang terbagi menjadi 18 kecamatan dan 107 kelurahan.²⁷

Berdasarkan PP Nomor 23 tahun 1988, luas wilayah Kota Palembang adalah 400,61 km² / 40,061 ha, dimana Kecamatan Gandus memiliki luas terbesar dibandingkan kecamatan lainnya (68,78 km² / 17,17 %) dan Kecamatan Ilir Barat II merupakan kecamatan dengan luas wilayah

²⁷ Kota Palembang dalam angka 2019, <https://palembangkota.bps.go.id>, Diakses tanggal 29 Oktober 2019,h,4.

terkecil (6,22 km² / 1,55%) . Wilayah Kota Palembang bagian utara, bagian timur, bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Ogan Ilir.²⁸

Tabel 2.1
Luas Setiap Kecamatan di Kota Palembang

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas (Km ²)
1	Iilir Barat II	29 Iilir	6.22
2	Gandus	Gandus	68.78
3	Seberang Ulu I	3/4 Ulu	8.28
4	Kertapati	Karya Jaya	42.56
5	Jakabaring	15 Ulu	9.16
6	Seberang Ulu II	14 Ulu	10.69
7	Plaju	Plaju Iilir	15.17
8	Iilir Barat I	Bukit Lama	19.77
9	Bukit Kecil	26 Iilir	9.92
10	Iilir Timur I	20 Iilir D III	6.50
11	Kemuning	Kemuning	9.00
12	Iilir Timur II	3 Iilir	10.82
13	Kalidoni	Kalidoni	27.92
14	Iilir Timur Tiga	8 Iilir	14.76
15	Sako	Sako Baru	18.04
16	Sematang Borang	Sri Mulya	36.98
17	Sukarami	Kebun Bunga	51.46
18	Alang-alang Lebar	Talang Kelapa	34.58
19	Palembang	Palembang	400.61

Sumber: BPS Kota Palembang.

2. Wilayah Administratif

Kota Palembang merupakan suatu daerah Tingkat II yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan

²⁸ *Ibid*

mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai UU No. 5 Tahun 1974.²⁹

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang No. 19 Tahun 2007 tentang pemekaran kelurahan dan Peraturan Daerah Kota Palembang No. 20 Tahun 2007 tentang pemekaran kecamatan, wilayah administrasi Kota Palembang mengalami perubahan dari 14 kecamatan dan 103 kelurahan menjadi 16 kecamatan dan 107 kelurahan.³⁰ Dua kecamatan pemekaran tersebut adalah, Kecamatan Alang-alang Lebar yang merupakan pecahan dari Kecamatan Sukarami, dan Kecamatan Sematang Borang yang merupakan pecahan dari Kecamatan Sako.

Sementara 4 kelurahan yang baru adalah Kelurahan Talang Jambe yang merupakan pecahan Kelurahan Talang Betutu, Kelurahan Sukodadi yang merupakan pecahan Kelurahan Alang-alang Lebar, Sako Baru pecahan dari Kelurahan Sako, dan terakhir Kelurahan Karya Mulya pecahan dari Kelurahan Sukamulya.

Pada Tahun 2018, berdasarkan SK Nomor 136/4123/BAK, wilayah administrasi Kota Palembang kembali mengalami pemekaran kecamatan dengan terbentuknya Kecamatan Jakabaring yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Seberang Ulu I dan Kecamatan Ilir Timur Tiga yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Ilir Timur II, sehingga saat ini wilayah administrasi Kota Palembang terbagi menjadi 18 kecamatan dan 107 kelurahan.

²⁹ <https://peraturan.bpk.go.id>, Diakses tanggal 1Maret 2020

³⁰ *Ibid*

Tabel 2.2
Jumlah Kelurahan, Rukun Warga, Rukun Tetangga dan Keluarga Menurut
Kecamatan di Kota Palembang

No	Kecamatan	Kelurahan	Rukun Warga	Rukun Tetangga	Keluarga
1	Iilir Barat II	7	51	206	23.631
2	Gandus	5	38	184	22.297
3	Seberang Ulu I	5	53	249	16.079
4	Kertapati	6	50	257	31.847
5	Jakabaring	5	45	216	13.601
6	Seberang Ulu II	7	57	263	45.178
7	Plaju	7	62	234	21.227
8	Iilir Barat I	6	67	301	22.670
9	Bukit Kecil	6	39	156	8.737
10	Iilir Timur I	11	66	264	10.660
11	Kemuning	6	51	200	31.541
12	Iilir Timur II	6	44	191	27.623
13	Kalidoni	5	41	244	36.585
14	Iilir Timur Tiga	6	36	179	12.112
15	Sako	4	62	271	23.594
16	Sematang Borang	4	26	130	10.423
17	Sukarami	7	70	387	42.794
18	Alang-alang Lebar	4	50	237	32.946
Jumlah/Total		107	908	4.169	433.545

Sumber: BPS Kota Palembang

3. Kependudukan

Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak enam kali sejak Indonesia merdeka, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010.

Penduduk Kota Palembang berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2018 sebanyak 1.643.488 jiwa yang terdiri atas 824.086 jiwa penduduk

laki-laki dan 819.402 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2010, penduduk Palembang mengalami pertumbuhan sebesar 1,42 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2018 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 100,57 persen yang berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.

Kepadatan penduduk di Kota Palembang tahun 2018 mencapai 4.102 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 18 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Ilir Timur I dengan kepadatan sebesar 12.048 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Gandus sebesar 945 jiwa/km².³¹

Tabel 2.3

Jumlah Penduduk Kota Palembang Menurut Jenis Kelamin

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Ilir Barat II	36.289	36.098	72.387
2	Gandus	33.067	31.926	64.994
3	Seberang Ulu I	46.905	46.107	93.013
4	Kertapati	46.277	44.700	90.978
5	Jakabaring	46.564	45.608	92.172
6	Seberang Ulu II	53.227	52.588	105.815
7	Plaju	44.901	44.743	89.643
8	Ilir Barat I	69.927	70.006	139.933
9	Bukit Kecil	24.503	25.154	49.657
10	Ilir Timur I	38.194	40.122	78.314
11	Kemuning	46.322	46.525	92.846
12	Ilir Timur II	47.319	47.491	94.810

³¹ Kota Palembang dalam angka 2019, <https://palembangkota.bps.go.id>, Diakses tanggal 29 Oktober 2019 h.36.

13	Kalidoni	56.244	55.447	111.691
14	Ilir Timur Tiga	42.561	42.376	84.938
15	Sako	46.155	46.146	92.301
16	Sematang Borang	18.168	17.864	36.033
17	Sukarami	78.619	77.890	156.509
18	Alang-alang Lebar	48.844	48.611	97.455
	Jumlah	824.086	819.402	1.643.488

Sumber: BPS Kota Palembang

4. Ketenagakerjaan

Pada tahun 2018 jumlah angkatan kerja di Kota Palembang sebanyak 742.346 orang. Dari keseluruhan angkatan kerja tersebut, 92,79 % diantaranya merupakan penduduk yang bekerja. Sementara tingkat pengangguran Kota Palembang pada tahun 2018 sebesar 7,21 %. Angka Pengangguran ini dihitung dengan mendefinisikan menganggur sebagai mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan dan sudah mendapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Dilihat dari komposisi pendidikan tertinggi yang ditamatkannya, 66,77 % dari angkatan kerja merupakan penduduk yang telah menamatkan pendidikan sampai level SMA / sederajat ke atas, bahkan 23,08 % diantaranya telah menamatkan pendidikan diploma ke atas.

Berdasarkan lapangan pekerjaan utama dari penduduk yang bekerja di Kota Palembang, persentase terbesar penduduk laki-laki bekerja di sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan, sedangkan persentase

terbesar penduduk perempuan bekerja di sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel.³²

Tabel 2.4

Jumlah Angkatan kerja di Kota Palembang

Kegiatan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Angkatan Kerja	451.984	290.362	742.346
Bekerja	420.063	268.738	688.801
Pengangguran	31.921	21.624	53.545
Bukan Angkatan Kerja	155.288	325.096	480.384
Sekolah	65.748	76.580	142.328
Mengurus Rumah Tangga	45.752	233.239	278.991
Lainnya	43.788	15.277	59.065
Tingkat Partisipasi Kerja	74.43	47.18	60.71
Tingkat Pengangguran	7.06	7.45	7.21

Sumber: BPS Kota Palembang

B. Pemilihan Umum Pada Pilpres 2019

Pengertian pemilihan umum adalah mekanisme memilih pemimpin-pemimpin yang diusung oleh partai politik dan atau melalui jalur independen untuk berkompetisi secara sehat guna merebut sebanyak mungkin suara pemilih

³² *Ibid.*, h.37.

untuk menduduki jabatan publik. Menurut Darmawan (2015), pemilihan umum (*dalam bahasa inggris disingkat general election atau election*) ialah mekanisme memilih pemimpin-pemimpin yang akan menduduki jabatan politik strategis tertentu di dalam lembaga-lembaga politik formal, yakni: lembaga eksekutif dan lembaga legislatif di tingkat pusat dan daerah.³³

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Amanat konstitusi tersebut untuk memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat, dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping itu, wilayah negara Indonesia yang luas dengan jumlah penduduk yang besar dan menyebar di seluruh Nusantara serta memiliki *kompleksitas* nasional menuntut penyelenggara pemilihan umum yang profesional dan memiliki *kredibilitas* yang dapat di pertanggungjawabkan.³⁴

³³ Tareh Rasyid.(2017).*Buku Pengantar Ilmu Politik*, Yogyakarta:Idea Press Yogyakarta, Cet, Ke-1,h.88.

³⁴ Rozali Abdullah, (2009). *Mewujudkan Pemilu yang lebih berkualitas (Pemilu Legislatif)*, Jakarta: Rajawali Pers.h.387.

Sejarah singkat pemilu di Indonesia telah diadakan sebanyak 12 kali pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019. Asas dalam sejarah Pemilu di Indonesia adalah LUBER, yaitu Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia yang sudah ada sejak zaman Orde Baru.

Pada Era Reformasi kemudian berkembang suatu istilah Jurdil yang berarti Jujur dan Adil. Jujur berarti bahwa pemilu harus dilaksanakan sesuai aturan untuk memastikan bahwa semua warga negara yang memiliki hak bisa memilih sesuai keinginannya dan setiap suara bernilai sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Sementara asas adil adalah perlakuan yang sama terhadap para peserta pemilu dan pemilih tanpa adanya perlakuan istimewa atau diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Semua asas ini mengikat para peserta, pemilih dan penyelenggara pemilu.³⁵

Pemilihan umum dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah negara Republik Indonesia termasuk di Kota Palembang. Pemilihan Umum dilaksanakan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, program kerja dan jadwal Pemilihan Umum tahun 2019. Pada pemilihan umum ini peneliti fokus kepada Pilpres 2019 yang dilakukan di Kota Palembang.

³⁵ <https://sejarahlengkap.com/indonesia/sejarah-singkat-pemilu-di-indonesia>, Diakses tanggal 29 Oktober 2019.

Tabel 2.5**Jumlah DPT pada Pilpres 2019 di Kota Palembang**

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Iilir Barat II	23.449	23.693	47.142
2	Gandus	23.290	22.499	45.790
3	Seberang Ulu I	31.162	30.574	61.728
4	Kertapati	31.455	31.249	52.704
5	Jakabaring	29.178	29.713	58.891
6	Seberang Ulu II	33.274	32.986	66.260
7	Plaju	33.330	33.768	67.096
8	Iilir Barat I	48.511	49.741	98.252
9	Bukit Kecil	16.525	17.891	34.416
10	Iilir Timur I	25.739	27.878	53.617
11	Kemuning	28.680	29.787	58.378
12	Iilir Timur II	31.246	32.559	63.805
13	Kalidoni	39.810	40.366	80.176
14	Iilir Timur III	27.322	27.946	55.268
15	Sako	32.377	33.188	65.565
16	Sematang Borang	17.803	17.495	35.292
17	Sukarami	54.610	56.817	111.514
18	Alang-alang Lebar	29.496	30.697	60.193
Total		557.257	568.847	1.126.104

Sumber: KPU Kota Palembang

C. Penyelenggara Pemilihan Umum

Penyelenggara Pemilu memiliki posisi strategis berkaitan dengan penyelenggara Pemilu. Dalam perjalanan politik Indonesia, penyelenggara Pemilu mempunyai dinamika tersendiri. Pada Pemilu 1955, penyelenggara Pemilu adalah

sejumlah partai politik yang ikut dalam kontestan Pemilu, selama Orde Baru penyelenggara Pemilu dipegang pemerintah. Pada Pemilu 1999, penyelenggara Pemilu terdiri atas unsur partai politik dan pemerintah. Selanjutnya untuk Pemilu 2004 penyelenggara Pemilu diserahkan kepada kalangan independen. Hal ini sesuai dengan ketentuan konstitusi yang menegaskan bahwa komisi penyelenggara Pemilu bersifat nasional, tetap, dan mandiri.³⁶

Pada prinsipnya sifat KPU tetap sebagaimana diatur dalam UU No.12 Tahun 2003, yaitu bersifat nasional, tetap dan mandiri. Hanya saja dalam undang-undang baru ini, yaitu UU No.22 Tahun 2007 dinyatakan dengan kalimat yang berbeda, yaitu: “Wilayah kerja KPU meliputi wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan tugas dan wewenangnya. Sedangkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota juga sama seperti sebelumnya yaitu bersifat tetap dan mandiri.

KPU di setiap tingkatan berkedudukan di ibukota masing-masing daerah, yaitu KPU berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia, KPU Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KPU Provinsi dan KPU Provinsi bertanggung jawab kepada KPU. Dalam hal ini terdapat desentralisasi kewenangan, antara lain adanya kewenangan KPU Provinsi untuk memberhentikan anggota KPU Kabupaten/Kota, termasuk mengenakan sanksi administratif kepada anggota KPU Kabupaten/Kota.

³⁶ Nur Hidayat Sardini.(2011).*Restorasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia*, Yogyakarta: Fajar Media Press,cet.Ke-1,h.42.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris. Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal serta Sekretaris KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁷

Undang-undang juga membagi secara rinci fungsi, tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif, Pemilu presiden dan Pemilu kepala daerah. Namun, secara umum, tugas dan wewenang KPU dipilah menjadi enam kelompok: *Pertama*, menyusun peraturan pelaksanaan, tata kerja lembaga dan standarisasi logistik Pemilu. *Kedua*, membuat perencanaan dan jadwal Pemilu. *Ketiga*, melaksanakan tahapan-tahapan Pemilu. *Keempat*, menetapkan setiap hasil tahapan Pemilu. *Kelima*, menangani pelanggaran peraturan Pemilu yang melanggar dan kode etik. *Keenam*, menindak petugas Pemilu yang melanggar kode etik.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPU kabupaten/kota dibantu oleh PPK, PPS, PPSLN, KPPS, KPPSLN yang juga memiliki sifat *ad hoc*. Penyelenggaraan pemilihan umum di tingkat kabupaten diselenggarakan oleh KPU Kabupaten/Kota. Sementara di tingkat TPS dilaksanakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Syafaat (2014:1) mengatakan KPPS adalah kelompok penyelenggara pemungutan suara yang dibentuk oleh PPS atas

³⁷ Rozali Abdullah, *op.cit.*, h.20.

nama KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota di TPS. Syarat untuk menjadi anggota KPPS adalah sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia paling rendah dua puluh lima (25) tahun;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus Tahun 1945;
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- e. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu lima tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. Berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
- g. Mampu secara jasmani dan rohani;
- h. Berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat untuk PPK, PPS, dan PPLN; dan
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.³⁸

Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama ketua KPU Kabupaten/Kota. PPS wajib melaporkan pengangkatan dan pemberhentian

³⁸ Eduard Ola Bebe Gorantokan, *Kualitas Kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Di Kabupaten Lembata Tahun 2014*, Politico: Jurnal Ilmu Politik, p-ISSN 2302-5603, 2017.

anggota KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota. Susunan ketua merangkap anggota dan anggota. Adapun Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPPS adalah :³⁹

1. Mengumumkan dan menempelkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS.
2. Menyerahkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada saksi peserta pemilu yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan.
3. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
4. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS.
5. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas Pemilu Lapangan, peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara.
6. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel.
7. Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawasan Pemilu Lapangan, dan PPK melalui PPS.
8. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Pengawas Pemilu Lapangan.
9. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama.
10. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

³⁹ Rozali Abdullah, *op.cit.*, h.81.

11. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.

Adapun Tugas dari masing-masing KPPS adalah sebagai berikut:

1. KETUA KPPS

- 1) Memimpin rapat pemungutan suara
- 2) Memberikan penjelasan kepada Pemilih tentang tata cara pemberian suara
- 3) Menandatangani surat suara
- 4) Memberikan sejumlah jenis surat suara sesuai jenis pemilu kepada pemilih berdasarkan kehadiran, dengan ketentuan:
 - a. Apabila pemilih terdaftar dalam DPT, memberikan seluruh jenis surat suara kepada pemilih.
 - b. Apabila pemilih terdaftar dalam DPTb, memberikan sejumlah jenis surat suara sesuai jenis pemilu yang tercantum dalam formulir Model A.5-KPU kepada pemilih.
 - c. Apabila pemilih tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, memberikan seluruh jenis surat suara sesuai jenis Pemilu dan mengembalikan KTP-el atau identitas lain kepada pemilih.
- 5) Mengarahkan pemilih ke bilik suara diutamakan penyandang disabilitas, ibu hamil atau orang tua.
- 6) Membagi tugas kepada anggota KPPS untuk mendatangi pemilih jika terdapat pemilih di wilayah kerjanya yang menjalani tahanan sementara, rawat inap di RS atau puskesmas.

2. KPPS 2

- 1) Menerima dan mengurutkan formulir Model C6-KPU/Model A5-KPU/KTP-el/Identitas lain dari KPPS 4 berdasarkan urutan kehadiran.
- 2) Membantu tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS.

3. KPPS 3

- 1) Menerima dan mengurutkan formulir Model C6-KPU/Model A5-KPU/KTP- el/Identitas lain dari KPPS 4 berdasarkan urutan kehadiran.
- 2) Membantu tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS.

4. KPPS 4

- 1) Memeriksa seluruh jari tangan pemilih.
- 2) Meminta kepada pemilih menunjukkan identitas pemilih.

5. KPPS 5

- 1) Menuliskan nama pemilih dan jenis disabilitas pemilih yang belum tercantum dalam formulir Model C7.DPTb-KPU/Model C7.DPK-KPU ke dalam formulir tersebut sesuai dengan formulir Model A.4-KPU/Model A.DPK-KPU.
- 2) Meminta kepada pemilih untuk menandatangani Model C7.DPT-KPU/Model C7.DPTb-KPU/Model C7.DPK-KPU.
- 3) Mempersilahkan pemilih menempati tempat duduk yang telah disediakan untuk mendapatkan surat suara yang akan dicoblos sesuai urutan kehadiran.
- 4) Menuliskan nama pemilih kedalam Model C7.DPTb-KPU, apabila terdapat pemilih yang hadir belum tercantum dalam A4-KPU.

6. KPPS 6

- 1) Mengatur dan memastikan pemilih memasukkan masing-masing surat suara ke dalam kotak suara sesuai jenis Pemilu

7. KPPS 7

- 1) Mengatur dan meminta pemilih yang akan keluar TPS untuk mencelupkan salah satu jari Pemilih ke dalam tempat tinta.⁴⁰

⁴⁰ Bawaslu .*Buku Saku Saksi Peserta Pemilu Tahun 2019.*

D. KPU Kota Palembang

Salah satu kebijakan dalam bidang politik dalam negeri yang tercantum dalam Ketetapan MPR-RI Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN tahun 1999-2004 adalah “menyelenggarakan Pemilihan Umum secara berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas dasar prinsip demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan beradab yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Independen dan Non Partisipan selambat-lambatnya pada tahun 2004”.⁴¹

Mengingat pemilihan umum merupakan salah satu program yang harus dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun secara kontinu, maka diperlukan institusi yang mempunyai wewenang secara khusus dalam menangani pemilu agar dapat berjalan sesuai dengan amanat konstitusi. Institusi tersebut bersifat tetap, nasional dan mandiri.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka pemerintahan menyusun langkah-langkah persiapan pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu mula dari tingkat pemerintahan pusat hingga pemerintahan kabupaten/kota. *Implikasi* langkah persiapan pemerintah tersebut adalah:

1. Menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang pembentukan Komisi Pemilihan Umum.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Pentapan Organisasi dan Tata

⁴¹ <https://kota-palembang.kpu.go.id/> Diakses tanggal 1Maret 2020

Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 tahun 2000.

3. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Di provinsi, Kabupaten/kota.

Keberadaan KPU Kota Palembang diawali dengan pembentukan Perwakilan Sekretariat Umum KPU Kota Palembang pada bulan Desember Tahun 2002 yang dipimpin oleh 1 (satu) orang sekretaris dibantu oleh 2 (dua) orang sub bagian yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi pelayanan administrasi yang meliputi pemberian dukungan staf.⁴²

Anggaran sarana dan prasarana Drs. Syaifuddin Azhar, M.M selaku sekretaris, dibantu sub bagian teknis Pemilihan Umum dan Hukum (Indra caya) dan sub bagian penerangan masyarakat dan umum (Taufik Hidayat, S.Sos) Untuk memenuhi Pasal 19 ayat 5 Undang-Undang RI. No.12 Perwakilan Sekretaris Umum KPU Kota Palembang ditugaskan untuk memfasilitasi tim seleksi pembentukan anggota KPU dari tanggal 1 April sampai dengan 13 juni 2003 untuk menetapkan keanggotaan KPU sebanyak 5 (lima) orang, berdasarkan surat keputusan KPU No.450/tahun 2003 tentang pengangkatan anggota KPU Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, terbentuk keanggotaan KPU Kota Palembang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: Rosyidah M. Rozali, SH, Kemas Khoirul Mukhlis, Dencik Naya, SH, H. Edi Saat, SH dan Ir. Ahmad Fuad Anwar.

⁴² *Ibid*

Kemudian melalui pemilihan dari anggota dan untuk anggota terpilih kemas khoirul Mukhlis sebagai ketua kota Palembang periode tahun 2003-2008. Sejak terbentuknya KPU Kota Palembang nama perwakilan sekretariat umum KPU Kota Palembang mengalami perubahan hingga saat ini bernama “KPU Kota Palembang” yang berkendudukan di Jalan Mayor Santoso No.2 Kemboja Palembang.⁴³

1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang masa bakti 2003-2008:

1. Kemas Khoirul Mukhlis (Ketua)
2. Ir.Ahmad Fuad Anwar (Divisi Sosialisasi)
3. H.Eddy Saad, SH.,MM (Divisi Verifikasi)
4. H.Dencik Naya, SH (Divisi Hukum)
5. Rosyidah M Rozali, SH (Divisi Logistik)

2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang masa bakti 2008-2013:

1. H.Eftiyani, SH (Ketua)
2. Abdul Karim, S.Ag (Divisi Teknis Penyelenggara, Humas dan informasi)
3. Yudha Mahrom Darma Saputra, SE (Divisi Perencanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan SDM)

⁴³ *Ibid*

4. Rudiyanto Pangaribuan (Divisi Keuangan, Logistik, Umum dan Rumah
Tangga)

5. Dra.Wastu Widya (Divisi Hukum dan Pengawasan)

3. Sekretaris:

1. Drs. Syaifuddin Azhar, M.M (2003 – 2005)

2. Achmad Suardi.SH (2005 – 2007)

3. Shinta Raharja, SH.SE (2007 – 2010)

4. Drs.Ratu Dewa, M.Si (2010 – sekarang)

Komisi Pemilihan Umum dibentuk dari Pusat hingga di Kabupaten/ Kota diseluruh Indonesia berdasarkan Undang-undang No.12/2003 serta Sekretariat KPU yang terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kasub Bag, terdiri dari:

1. Kasub Bag Program dan Data

2. Kasub Bag Keuangan dan Umum, Logistik

3. Kasub Bag Tekhnis Penyelenggara

4. Kasub Bag Hukum

Tabel 2.6

Anggota KPU Kota Palembang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

NO	NAMA	JABATAN
1	Syarifudin,SE, M.Si	Ketua
2	Kurniawan, S.Pd	Anggota
3	Munawwaroh, S.Sos., M.E	Anggota
4	Muhammad Joni, S.E	Anggota
5	Kurniawan, S.E	Anggota

Sumber: KPU Kota Palembang

Tabel 2.7

**Anggota Sekretaris KPU Kota Palembang Pada Pemilihan Umum Tahun
2019**

NO	NAMA	JABATAN
1	Hj. Ferlyna Threesia, S.Pd, M.Si	Sekretaris
2	Panji Patria Negara, S.IP	Kasubbag Program dan Data
3	Indra Edriansyah, S.E	Kasubbag Keuangan, Umum Dan Logistik
4	Hj Triananda Rindha Agustina, SH	Kasubbag Hukum
5	Syamsiah, S.H, M.H	Kasubbag Teknis Pemilu Dan Humas

Sumber: KPU Kota Palembang

E. Visi dan Misi KPU Kota Palembang

1. VISI

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL

2. MISI

1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesable.

F. Dasar Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi pemilihan Umum (Lembar Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5246;

2. Undang-undnag Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembar negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan lembag Negara Republik Indonesia Nomro 5246;
3. Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 tahun 2008 dan peraturan KPU nomor 37 tahun 2008;
4. Peraturan KPU Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretaris Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KP Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 tahun 2008;
5. Peraturan KPU nomor 04 tahun 2010 Tentng Uraian Tugas Staf Pelaksanaan pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
6. Peraturan KPU Nomor 01 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan KPU.
7. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
8. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, pembedikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum.

Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap *Legitimasi* masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Sebagaimana diadakannya pemilihan umum antara lain adalah guna memperoleh legitimasi rakyat bagi pemimpin atau anggota legislatif. Untuk melahirkan kepemimpinan politik yang berkualitas dan memiliki akutabilitas tinggi, karena itulah untuk memperkuat legitimasi demokrasi di tingkat lokal maupun daerah, pemilu merupakan instrumen terbaik dalam menentukan pemimpin yang legitimasi. Pemilu yang memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dianggap memiliki legitimasi yang tidak diragukan. Sebaliknya, apabila tingkat partisipasi kecil (rendah), seringkali dikaitkan dengan pertanyaan dasar, apakah hasil pemilu legitimasi yang kuat atau rendah.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan di analisis data yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada beberapa informan di kota Palembang pada beberapa kecamatan yang ada, terdiri dari masyarakat biasa hingga tokoh masyarakat. Data yang akan di sampaikan dan dianalisis adalah gambaran golongan putih yang ada di kota Palembang dan faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat yang telah terdaftar sebagai pemilih tapi tidak ikut memilih pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di kota Palembang pada tahun 2019.

A. Gambaran Umum Keberadaan Golput Di Kota Palembang

Pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di kota Palembang tahun 2019 angka golput mencapai 19,3 % dari keseluruhan daftar pemilih yang telah di tetapkan yang artinya masih banyak masyarakat di kota Palembang yang tidak berpartisipasi pada saat pemilihan berlangsung.

Golput adalah *akronim* dari golongan putih, istilah ini di tunjukan kepada mereka yang dengan sengaja dan dengan suatu maksud dan tujuan yang jelas menolak memberikan suaranya dalam pemilu dengan demikian , orang yang berhalangan hadir di tempat pemilihan suara (TPS) hanya karena alasan teknis, seperti jauhnya TPS atau lagi sakit dan juga karena usia yang membuat malas datang ke TPS.

Di kota Palembang mengambil beberapa kecamatan yang memiliki tingkat golput tertinggi pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dalam hal ini

banyak masyarakat di kategori *pragmatis* karena mereka *apatis* akan pemilu yang berjalan saat ini dan juga banyak masyarakat saat ini yang bertanya tentang Golput tidak mengetahui artinya yang membuat banyak suara yang dikeluarkan tidak terlalu berpengaruh pada hasil pemilu.

Hal ini dikemukakan oleh hasil wawancara salah satu pemilih di kecamatan di kota Palembang:

“Pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, saya pribadi mengatakan golput saat itu di karenakan saya tidak terlalu percaya terhadap figur kedua pasang calon pada Pilpres, selain itu suara yang terhitung satu yang saya miliki tidak akan merubah hasil pilpres dan saya lebih memilih untuk golput dan menjalankan kesibukan yang saya anggap lebih penting”.⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa masyarakat memilih golput dikarenakan mereka tidak terlalu percaya terhadap calon yang maju sebagai kandidat serta mereka beranggapan bahwa suara mereka kelak tidak akan berpengaruh terhadap hasil pemilu atau dapat dikatakan kepercayaan politik yang ada pada masyarakat mulai menurun, atas itu mereka lebih mementingkan pekerjaan pribadi dari pada datang ke tempat pemungutan suara untuk memberikan hak suara mereka.

Pernyataan di atas menjelaskan tentang pemilih golput dalam kategori *pragmatis*, sejalan apa yang di ungkap Indra J.Pilliang, bahwa golput *pragmatis* yaitu golput yang berdasarkan *kalkulasi rasional* betapa ada atau tidak ada pemilu, ikut atau tidak ikut memilih, tidak akan berdampak atas diri si pemilih, sikap mereka setengah-setengah memandang proses pemilihan yang di lakukan pada saat

⁴⁴ Hasil wawancara dengan AD informan masyarakat di kecamatan Alang- Alang Lebar yang dilakukan pada tanggal 09 Desember 2019

pemilihan berlangsung antara percaya dan tidak percaya. Hal ini didukung oleh masyarakat yang bekerja sebagai Di Swasta yang lebih memilih pekerjaan mereka ketimbang harus hadir di tempat pemungutan suara berlangsung.

Sifat dari golput *pragmatis* yang tidak permanen yang memungkinkan pemilih ikut berpartisipasi atau tidaknya dalam pemilu yang diadakan, berdasarkan hasil wawancara berikut ditemukan pemilih yang pada Pilpres tahun lalu ikut berpartisipasi tapi pada Pilpres tahun 2019 ini lebih memilih untuk golput:

*“Pada Pilpres tahun lalu saya memang memilih dikarenakan tingginya ekspektasi pada Jokowi-Jusuf Kalla tapi melihat kinerjanya selama masa periode jabatannya, saya tidak melihat perubahan pada kehidupan saya pribadi, namun pada Pilpres 2019 ini saya lebih memilih tidak menggunakan hak suaranya karena tidak percaya lagi pada figur kandidat, kemudian memilih atau tidak memilih tidak akan berpengaruh pada kehidupan saya”.*⁴⁵

Masyarakat kota Palembang baru saja menggelar pesta demokrasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 17 April 2019 baru-baru ini. Dari hasil rekapitulasi suara oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Palembang, tingkat Partisipasi pemilih menunjuk angka 80.93 % atau 925.545 orang yang menggunakan hak pilih yang artinya daftar pemilih tetap yang melakukan golput sebesar 19,3 % atau 217.771 orang yang tidak menggunakan hak suaranya dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019. Tapi dari hasil rekapitulasi itu presentasi itu pemilih menunjukkan angka 80 % dari 1.126.087 orang yang terdaftar dalam Pemilih Tetap (DPT), hanya 80.93 % atau 925.545 orang yang

⁴⁵ Hasil wawancara dengan YF informan masyarakat di kecamatan Sukarami yang dilakukan pada tanggal 10 Desember 2019

menggunakan hak pilih yang artinya sebesar 19,3 % atau 217.771 orang yang tidak menggunakan hak suaranya dan jumlah ini bukanlah jumlah yang sedikit.

Keberadaan golongan putih di kota Palembang pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 sangat disayangkan karena pemilu ini sangat penting dalam menentukan nasib bangsa dan Negara kita tapi masih banyak yang memandang pemilu ini tidak menarik di perhatian masyarakat dan masyarakat lebih memilih melakukan pekerjaan lain yang lebih menguntungkan atau menikmati masa liburan lokal yang diberlakukan pada masa Pilpres ketimbang untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan menggunakan hak suaranya.

Angka golput di kota Palembang cenderung lebih tinggi di daerah perkotaan di banding pinggiran kota Palembang walaupun masih banyak daerah pinggiran kota yang banyak melakukan tindak golput hal ini dikarenakan masyarakat perkotaan lebih melihat kenyataan yang terjadi dimana dalam pemilu sekedar pertarungan antara beberapa kepentingan. Sementara di pinggiran kota Palembang masih ada yang tidak terkena sosialisasi yang dilakukan oleh KPU walaupun mengetahuinya kebanyakan masyarakat lebih mementingkan pekerjaan bukan hanya di pinggiran kota tapi di perkotaan sendiri banyak yang tidak mengetahui adanya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU.

Pemilih golput beranggapan bahwa pekerjaan lebih penting dibanding mendengarkan sosialisasi pemilu tapi ada juga masyarakat yang tidak mengetahuinya, dalam hal ini dikarenakan kesibukan yang dilakukannya, pemilih juga melakukan tindakan golput karena beranggapan bahwa dalam pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden tahun 2019 hanya sekedar pertarungan kepentingan golongan yang hanya mementingkan kelompok kepentingan dibandingkan memajukan Negara dan masyarakat beranggapan apabila salah satu menang bukanlah kemenangan rakyat melainkan kemenangan golongan tertentu sehingga membuat masyarakat apatis akan hal ini dan membuat kehilangan kepercayaan dalam pemilu.

B. Faktor Penyebab Golput Di Kota Palembang

1. Faktor Psikologis

Faktor psikologis adalah tingkah laku atau biasa dikatakan perilaku yang mendorong oleh jiwa atau mental diri seseorang untuk melakukan aktivitas atau sebuah keputusan, salah satu hal yang mempengaruhi psikologis seseorang adalah kedekatan seseorang dengan orang lain.⁴⁶

Kedekatan masyarakat dengan salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden dapat menjadi salah satu faktor penyebab masyarakat memilih atau tidak memilih, pada temuan hasil wawancara yang dilakukan di lapangan mayoritas masyarakat yang menjadi informan tidak mempunyai hubungan dengan calon Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini berarti bahwa kedekatan masyarakat dengan kedua calon membuat alasan ikut memilih atau tidak ikut memilih dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Kampanye adalah usaha yang dilakukan oleh kandidat dalam meyakinkan calon pemilih untuk memilih dirinya dan untuk mendapatkan dukungan sebesar-besarnya dengan cara menawarkan program kerja dan

⁴⁶ Bimo Walgito. *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta, 2010) Hlm. 26

melakukan pendekatan langsung ke masyarakat atau menggunakan tim khusus kampanye. Melalui kampanye para kandidat melakukan pendekatan dengan cara menawarkan program dengan harapan calon pemilih merasa yakin dan memberikan *mandatnya*. Bagi publik atau calon pemilih, kampanye adalah sarana untuk melihat, mengamati, menentukan calon mana yang cocok untuk dipilihnya. Sama halnya dengan kampanye bukan hanya sekedar kebutuhan para anggota calon Presiden dan Wakil Presiden tetapi juga merupakan kebutuhan pemilih untuk menentukan pilihannya bahkan menentukan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya atau tidak.

Tingkat kepedulian masyarakat terhadap kampanye yang dilakukan oleh calon Presiden dan Wakil Presiden tidak begitu besar, hasil temuan informasi saat dilapangan kebanyakan masyarakat tidak ikut serta dalam kampanye hanya sebagian kecil yang mengikutinya.

Hal ini berarti keikutsertaan masyarakat dalam berkampanye tidak menjadi penentu seorang ikut dalam pemilihan, kebanyakan masyarakat yang ikut serta dalam kampanye hanya sebagai *massa* yang menikmati pertunjukan hiburan yang telah disediakan oleh calon Presiden dan Wakil Presiden serta partai politik yang ikut serta dalam kampanye.

Setiap calon Presiden dan Wakil Presiden akan selalu berusaha mendekati diri dengan masyarakat agar mendapatkan *simpasti* dari masyarakat dari masyarakat dengan harapan masyarakat tersebut akan memilihnya pada saat pemilihan berlangsung. Setiap calon akan terus

berusaha mendekati diri kepada masyarakat melalui kampanye yang dilakukan secara langsung di lapangan, kampanye melalui media massa, televisi, radio maupun melalui spanduk yang telah di pasang.

Mereka juga tidak jarang melakukan sumbangan-sumbangan pada korban bencana yang ada di daerahnya pada saat pemilihan sudah dekat, hal ini dilakukan agar dapat menarik perhatian masyarakat dengan harapan masyarakat akan memilihnya pada saat pemilihan sudah tiba.

Pada hasil temuan yang dilakukan di lapangan menunjukkan *mayoritas* informan masyarakat menilai para calon Presiden dan Wakil Presiden dari pendekatan yang baik kepada masyarakat tetapi masyarakat sudah paham bahwa itu adalah salah satu strategi calon dalam mendapatkan suara sebanyak-banyaknya dengan cara mendapatkan hati masyarakat melalui pendekatan yang dilakukan. Bagi sebagian masyarakat yang kagum akan memilih calon tersebut tapi sebagian masyarakat tidak terpengaruh dengan cara tersebut, seperti yang dikatakan oleh beberapa informan masyarakat:

*“Dalam kampanye mereka berusaha mendekati diri dengan masyarakat agar dapat dipilih dalam pemilu tapi setelah mendapatkan banyak suara kebanyakan mereka tidak melakukan hal itu lagi”.*⁴⁷

Wawancara sebelumnya senada dengan hasil wawancara di bawah ini:

*”Saya golput karena tidak ada sosialisasi di tempat saya jadi saya kurang tau dengan calon yang akan memilih”.*⁴⁸

⁴⁷ Hasil wawancara dengan SI informan masyarakat di kecamatan Gandus yang dilakukan pada tanggal 11 Desember 2019

⁴⁸ Hasil wawancara dengan HN informan masyarakat di kecamatan Plaju yang dilakukan pada tanggal 12 Desember 2019

Wawancara sebelumnya sependapat dengan hasil wawancara di bawah ini:

*“Saya kurang tau dengan visi dan misi calon karena tidak ada kampanye yang dilakukan disini karena kampanye yang dilakukan hanya pada satu tempat”.*⁴⁹

Jadi dapat dikatakan bahwa faktor kedekatan yang dilakukan oleh calon Presiden dan Wakil Presiden dalam melakukan kampanye dapat mempengaruhi masyarakat dalam memilih atau tidak memilih dalam pemilihan yang akan berlangsung.

Pada Pilpres tahun 2019 di Kota Palembang masyarakat banyak yang melakukan tindak golput dengan alasan faktor psikologis dimana kedekatan yang kurang masyarakat rasakan terhadap kandidat calon Presiden dan Wakil Presiden, hal ini disebabkan karena lemahnya sosialisasi politik yang dilakukan kandidat calon. Sosialisasi yang dilakukan kandidat tidak menyentuh ke lapisan bawah dan hanya cenderung fokus di suatu tempat kemudian sikap *apatitis* terhadap aktivitas politik seperti kampanye yang menyebabkan prasangka tentang aktivitas politik adalah hal yang sia-sia kemudian jika dilihat dari pribadi masyarakat yang melakukan golput yang tidak peduli dan tidak acuh menyebabkan tidak memilih dalam pemilu. Hal ini ditegaskan dengan hasil dari wawancara dengan informan:

“saya mengatakan bahwa bukan faktor eksternal yang menyebabkan saya melakukan tindak golput namun dari diri saya pribadi menolak dan tidak ingin ikut campur dalam aktivitas

⁴⁹ Hasil wawancara dengan SO informan masyarakat di kecamatan Ilir Barat 1 yang dilakukan pada tanggal 14 Desember 2019

politik yang selama ini syarat akan kepentingan satu golongan saja dan tidak akan merubah hidup saya , selain itu saya juga tidak mengenal kandidat Pilpres yang melakukan sosialisasi di daerah Plaju karena itulah saya melakukan tindak golput karena menurut saya tidak terlalu penting buat saya “. ⁵⁰

Wawancara sebelumnya senada dengan hasil wawancara di bawah ini:

“Saya kurang mengenal calon Pilpres karena tidak ada kampanye yang di lakukan di tempat saya”. ⁵¹

Wawancara sebelumnya senada dengan hasil wawancara di bawah ini:

“Saya golput karena tidak adanya kampanye di daerah saya yang membuat saya kurang tertarik dalam memilih”. ⁵²

Wawancara sebelumnya senada dengan hasil wawancara di bawah ini:

“Saya kurang tertarik untuk memilih karena tidak da kampanye yang dilakukan di daerah tempat saya”. ⁵³

Wawancara sebelumnya senada dengan hasil wawancara di bawah ini:

“Saya kurang tau dengan visi dan misi calon karena tidak ada kampanye yang dilakukan jadi saya memilih golput”. ⁵⁴

Faktor psikologis yang menyebabkan golput pada sebagian masyarakat di Kota Palembang melihat dari teori Partisipasi Politik yang dikemukakan oleh Milbrath menyatakan bahwa keterbukaan dan kepekaan seseorang terhadap perangsang politik melalui kontak-kontak pribadi, organisasi dan melalui media massa akan memberikan pengaruh bagi keikutsertaan seseorang dalam kegiatan politik. Selain itu analisis ini

⁵⁰ Hasil wawancara dengan SI informan masyarakat di kecamatan Ilir Timur 3 yang dilakukan pada tanggal 13 Desember 2019

⁵¹ Hasil wawancara dengan RA informan masyarakat di kecamatan Ilir Timur 2 yang dilakukan pada tanggal 8 Desember 2019

⁵² Hasil wawancara dengan JF informan masyarakat di kecamatan Sako yang dilakukan pada tanggal 14 Desember 2019

⁵³ Hasil wawancara dengan DN informan masyarakat di kecamatan Sematang Borang yang dilakukan pada tanggal 15 Desember 2019

⁵⁴ Hasil wawancara dengan AG informan masyarakat di kecamatan Sebrang Ulu 1 yang dilakukan pada tanggal 16 Desember 2019

sejalan dengan tipologi pada Teori Partisipasi Politik yaitu: Tipologi partisipasi politik menurut Ramlan Surbakti dibedakan menjadi tiga yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif dan golongan putih (golput).

Partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan yang dibuat oleh kebijakan pemerintah dan golongan putih (golput) atau kelompok apatis, karena tidak peduli dengan sistem politik yang ada bahkan menyimpang dengan tidak memilih.

Secara Teoritis, perasaan *apatis* sebenarnya merupakan penejelmaan jauh dari kepribadian *otoriter*, yang secara sederhana ditandai dengan tidak ada minat terhadap persoalan politik. Hal ini di akibatkan oleh tidak adanya sosialisasi dan rangsangan politik atau adanya perasaan tidak puas dengan aktivitas politik. Dalam hal ini mereka melihat aktivitas politik adalah hal yang sia-sia dan tidak mempengaruhi kehidupan pemilih dan bagi pemilih seperti ini memilih atau tidak memilih tidak akan merubah apapun dalam kehidupannya karena menurut mereka keputusannya tidak akan berpengaruh apapun.

Sebab para pemilih lebih memilih menggunakan logika sendiri dalam mengambil keputusan politik karena itu mereka beranggapan disbanding memilih dan tidak akan merubah hidupnya lebih baik mencari hal yang lebih berguna yang dapat merubah kehidupannya

2. Faktor Sosial Ekonomi

Faktor sosial-ekonomi meliputi keadaan sosial dan keadaan ekonomi. Keadaan sosial yang meliputi pendidikan. Pendidikan merupakan faktor penting yang dapat meningkatkan sumber daya manusia baik itu pendidikan *formal* atau *informal*.

Tabel 3.1

Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Angkatan Kerja Tahun 2018

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan	Angkatan kerja tahun 2018	Bukan angkatan kerja	Jumlah
Tidak sekolah	-	3269	3269
Belum tamat sd	46.260	46.946	93.206
Sekolah dasar	123.302	71.289	194.591
Sekolah menengah pertama	77.411	126.090	203.501
Sekolah menengah atas	228.956	144.207	373.163
Sekolah menengah atas kejuruan	26.989	39.971	66.960
Diploma I,II,III	41.328	14.044	55.372
Universitas	130.008	39.208	169.216
Jumlah	742.346	480.384	1.159.098

Sumber: BPS Kota Palembang

Dari tabel diatas diketahui sebanyak 1.062.803 orang berpendidikan minimal sekolah dasar dan sebesar 96.295 orang yang tidak mengenal pendidikan bahkan tidak tamat sekolah dasar dari sini kita dapat simpulkan bahwa banyak masyarakat Kota Palembang termasuk cukup tinggi dalam tingkat pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa faktor pendidikan juga berpengaruh pada masyarakat Kota Palembang ikut atau tidak ikut memilih dalam pemilihan. sebab dengan pendidikan yang cukup tinggi di masyarakat membuat masyarakat golput karena pemikiran yang kritis dan rasional dalam berpikir dan membuat menolak calon yang mereka anggap kapasitas dan kapabilitas yang baik untuk memimpin, hal ini baru diketahui oleh peneliti setelah melakukan penelitian dilapangan sama halnya dengan masyarakat berpendidikan rendah atau tidak berpendidikan memilih golput di karenakan rendahnya tingkat kepedulian pada masalah politik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di lapangan diketahui bahwa golput di akibatkan faktor sosial yaitu tingkat pendidikan pemilih salah satunya dari sekian informasi yang peneliti dapat ada beberapa informan yang berpendidikan tinggi yang melakukan tindak golput pada Pilpres 2019 hasil wawancaranya sebagai berikut:

*“Sebenarnya pada Pilpres yang lalu saya lebih memilih golput karena setelah saya analisa dari pilpres tahun lalu hanya menghasilkan kekecewaan dari diri saya pribadi, ketika saya lihat saat kampanye kandidat calon Presiden dan Wakil Presiden hanya mengumbar janji dan setelah terpilih tidak dibuktikan dan hanya tinggal sebuah janji, hal itu terus terulang hingga menimbulkan pandangan buruk yang menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat berkurang”.*⁵⁵

Wawancara sebelumnya senada dengan hasil wawancara di bawah ini:

”Saya melihat calon yang ingin di pilih hanya ingin mendapatkan suara sebanyak mungkin agar dapat terpilih dengan menyebarkan

⁵⁵ Hasil wawancara dengan AR informan masyarakat di kecamatan Ilir Barat 1 yang dilakukan pada tanggal 14 Desember 2019

*beberapa janji palsu dan setelah terpilih banyak yang meupakannya karena itu saya lebih baik golput”.*⁵⁶

Hasil wawancara yang diatas menggambarkan bahwa dengan tingkat pendidikan yang tinggi juga membuat penyebab golput di Kota Palembang dan sebagian disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah, kondisi masyarakat di Kota Palembang juga banyak pemukiman berstatus ekonomi rendah sehingga banyak ditemukan golput yang terjadi di masyarakat yang kurang berpendidikan salah satu contohnya seperti hasil wawancara di bawah ini:

*“Saya memilih golput karena saya merasa bahwa suara saya belum tentu memiliki efek dalam pemilihan Pilpres dan dan jika saya memilih juga saya tidak mendapat apapun hanya rasa capek dibanding itu lebih baik saya ngojek dan mendapatkan uang, contoh saja yang memiliki pendidikan yang tinggi aja susah dalam mencari pekerjaan apalagi saya yang lulusan sd jadi saya pikir lebih baik saya bekerja”.*⁵⁷

Wawancara sebelumnya senada dengan hasil wawancara di bawah ini:

*”saya sendiri golput karena pendidikan yang saya miliki rendah sehingga mendapatkan pekerjaan yang gajinya tidak menentu dan membuat saya lebih memilih bekerja di banding datang ke TPS”.*⁵⁸

Wawancara sebelumnya sependapat dengan hasil wawancara di bawah ini:

*“Saya golput karena pendidikan yang kurang sehingga mendapatkan pekerja yang gajinya tidak stabil membuat”.*⁵⁹

⁵⁶ Hasil wawancara dengan OA informan masyarakat di kecamatan Sukarami yang dilakukan pada tanggal 10 Desember 2019

⁵⁷ Hasil wawancara dengan NN informan masyarakat di kecamatan Kertapati yang dilakukan pada tanggal 13 Desember 2019

⁵⁸ Hasil wawancara dengan HD informan masyarakat di kecamatan Kemuning yang dilakukan pada tanggal 7 Desember 2019

⁵⁹ Hasil wawancara dengan FI informan masyarakat di kecamatan Sebrang Ulu 1 yang dilakukan pada tanggal 16 Desember 2019

Dari wawancara ini dapat disimpulkan dengan pendidikan yang rendah membuat masyarakat dengan pendidikan rendah melakukan tindakan golput dikarenakan rendahnya pendidikan sehingga memiliki pekerjaan yang dengan gaji yang rendah dan tak menentu sehingga membuat masyarakat lebih memilih bekerja untuk mendapatkan uang dibanding harus datang ke TPS.

Selain faktor sosial faktor ekonomi yang rendah juga mengambil peran penting dalam terjadinya tindakan golput hal ini karena dengan pekerjaan yang memiliki gaji rendah dan tidak menentu membuat masyarakat lebih memilih bekerja dibanding datang ke TPS hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan informan yang berbunyi:

“Dalam pemilihan pada Pilpres tahun ini saya lebih memilih golput dan menjual gorengan karena jika saya memilih tidak akan merubah apapun bahkan nasib saya juga tidak berubah lebih baik saya bekerja dan menghasilkan uang , jika saya dipikir jika saya tidak bekerja dan lebih memilih datang ke TPS gimana saya memberi makan keluarga saya karena itu saya lebih memilih golput”.⁶⁰

Wawancara sebelumnya senada dengan hasil wawancara di bawah ini:

“Saya lebih milih kerja dibanding memillih”.⁶¹

Wawancara sebelumnya sependapat dengan hasil wawancara di bawah ini:

“Saya lebih milih kerja dan dapet uang dibanding milih”.⁶²

⁶⁰ Hasil wawancara dengan GT informan masyarakat di kecamatan Ilir Timur 1 yang dilakukan pada tanggal 14 Desember 2019

⁶¹ Hasil wawancara dengan BM informan masyarakat di kecamatan Plaju yang dilakukan pada tanggal 12 Desember 2019

⁶² Hasil wawancara dengan RD informan masyarakat di kecamatan Ilir Barat 1 yang dilakukan pada tanggal 14 Desember 2019

Wawancara sebelumnya di perkuat dengan hasil wawancara di bawah ini:

”Saya golput karena menurut saya lebih penting bekerja dibanding saya datang ke TPS”.⁶³

Wawancara sebelumnya senada dengan hasil wawancara di bawah ini:

“Menurut saya lebih baik bekerja dibanding datang ke tps”.⁶⁴

Wawancara sebelumnya sependapat dengan hasil wawancara di bawah ini:

“saya golput karena pekerjaan yang memiliki gaji kecil dan tak menentu sehingga membuat saya lebih memilih bekerja dibanding datang ke TPS”.⁶⁵

Wawancara sebelumnya di perkuat dengan hasil wawancara di bawah ini:

“saya melakukan tindak golput karena faktor pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan karena gaji yang tidak menentu”.⁶⁶

Wawancara sebelumnya di perkuat dengan hasil wawancara di bawah ini:

” Saya lebih baik bekerja di banding datang karena dengan datang ke TPS saya tidak mendapat apapun ”.⁶⁷

Wawancara sebelumnya sependapat dengan hasil wawancara di bawah ini:

“saya golput karena faktor ekonomi yang kurang dan pekerjaan tidak menentu”.⁶⁸

Faktor sosial-ekonomi merupakan faktor *Krusial* dan merupakan penyebab mayoritas masyarakat melakukan tindak golput , dengan tingkat pendidikan yang rendah membuat masyarakat mendapatkan pekerjaan

⁶³ Hasil wawancara dengan SO informan masyarakat di kecamatan Bukit Kecil yang dilakukan pada tanggal 18 Desember 2019

⁶⁴ Hasil wawancara dengan AN informan masyarakat di kecamatan Ilir Barat 2 yang dilakukan pada tanggal 19 Desember 2019

⁶⁵ Hasil wawancara dengan UI informan masyarakat di kecamatan Ilir Timur 2 yang dilakukan pada tanggal 8 Desember 2019

⁶⁶ Hasil wawancara dengan HA informan masyarakat di kecamatan Kalidoni yang dilakukan pada tanggal 20 Desember 2019

⁶⁷ Hasil wawancara dengan LA informan masyarakat di kecamatan Sematang Borang yang dilakukan pada tanggal 15 Desember 2019

⁶⁸ Hasil wawancara dengan SI informan masyarakat di kecamatan Sebrang Ulu 2 yang dilakukan pada tanggal 21 Desember 2019

dengan gaji yang rendah dan tidak menentu sehingga membuat masyarakat yang rendah *financial* sulit antara memilih untuk pergi ke TPS atau Bekerja dan kebanyakan masyarakat lebih memilih golput pada Pilpres tahun 2019 di Kota Palembang karena dalam diri masyarakat telah terbangun asumsi untuk mementingkan apa yang Nampak dan menghasilkan sesuatu yang pasti menguntungkan dibanding menggantungkan harapan yang tidak pasti.

Hal ini senada dengan teori partisipasi yaitu faktor-faktor lain, yang mempengaruhi partisipasi politik seperti status sosial, *afiliasi* politik orang tua, dan pengalaman berorganisasi. Yang dimaksud status sosial yaitu kedudukan seseorang berdasarkan keturunan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Selanjutnya status ekonomi yaitu kedudukan seseorang dalam lapisan masyarakat, berdasarkan pemilikan kekayaan. Seseorang yang mempunyai status sosial dan ekonomi tinggi diperkirakan tidak hanya mempunyai pengetahuan politik, akan tetapi memiliki minat serta perhatian pada politik dan kepercayaan terhadap pemerintah.⁶⁹

Masyarakat yang rendah pendidikannya lebih memilih untuk menghindari masalah politik karena tidak ada hubungannya dengan dirinya karena tidak terdapat kepentingannya dalam politik dan tidak dapat merubah kehidupan mereka berbeda dengan masyarakat yang bekerja di *sector* atau lembaga-lembaga yang berkaitan langsung dengan pemerintahan cenderung lebih tinggi tingkat kehadirannya dalam pemilu

⁶⁹ Ramlan Surbakti, 2006:144-145

dibanding dengan para pemilih yang bekerja yang tidak ada kaitannya dengan pemerintahan.

Masyarakat sudah lelah dengan janji-janji kampanye yang tidak pernah di tepati, pemilu kini mulai dipertanyakan oleh masyarakat, tidak ada keuntungan *signifikan* yang diperoleh oleh masyarakat dalam keikutsertaannya dalam pemilu. Dalam persepsinya ini masyarakat lebih mementingkan urusan lain yang lebih menguntungkan disbanding harus datang ke TPS.

Dari data yang didapat diketahui bahwa keseluruhan informan tidak menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kota Palembang hal ini menunjukkan masih ada masyarakat Kota Palembang yang masih belum berpartisipasi dalam Pilpres tahun 2019. Mayoritas informan memiliki alasan tidak menggunakan hak pilihnya dikarenakan *asumsi* yang terbangun dalam diri masyarakat yang lebih mementingkan kepentingan ekonomi serta menganggap pemilu tidak akan membawa perubahan dalam kehidupannya hal ini didukung oleh faktor pendidikan yang masih rendah.

3. Faktor Rasional

Faktor rasional adalah faktor yang disebabkan berdasarkan *standard logis*, dan tidak akan memilih keputusan yang membuatnya berada pada hal yang tidak menguntungkannya, dan keputusan yang diambil berdasarkan keuntungan terbaik yang di dapat.

Berdasarkan hasil temuan yang di dapat oleh peneliti dengan informan, dapat dilihat beberapa informan mengatakan bahwa visi dan misi yang di berikan oleh calon Presiden dan Wakil Presiden memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk tidak ikut serta dalam pemilu tapi beberapa informan lain mengatakan bahwa visi dan misi tidak mempengaruhi dalam hal tidak ikut memilih sesuai dengan hasil wawancara di bawah ini:

“Menurut saya justru Visi dan Misi sudah bagus dan mendorong masyarakat untuk ikut memilih tapi rasa kekecewaan masyarakat dan pengalaman janji-janji yang tidak terwujud membuat masyarakat melakukan golput”.⁷⁰

Wawancara sebelumnya senada dengan hasil wawancara di bawah ini:

“Saya golput karena visi dan misi yang di lontarkan calon menurut saya tidak akan merubah kehidupan saya lebih baik saya bekerja”.⁷¹

Faktor rasional ini melihat visi dan misi yang diberikan calon Presiden dan Wakil Presiden harus jelas dan program yang dikemukakan harus menarik simpati pemilih dan akan memilih mereka. Namun jika gagal dalam mempromosikan visi dan misi maupun programnya ke pemilih, maka pilihan untuk memilih adalah pilihan rasional bagi pemilih.

Bukan hanya melihat visi dan misi saja masyarakat di Kota Palembang yang memiliki pekerjaan yang gajinya tidak menentu lebih tertarik dengan bekerja karena dengan bekerja secara rasional bisa

⁷⁰ Hasil wawancara dengan KN informan masyarakat di kecamatan Ilir Timur 3 yang dilakukan pada tanggal 16 Desember 2019

⁷¹ Hasil wawancara dengan YE informan masyarakat di kecamatan Alang-Alang Lebar yang dilakukan pada tanggal 9 Desember 2019

mendapatkan uang di bandingkan datang ke TPS dan tidak menghasilkan sesuatu hal ini di dukung oleh beberapa pendapat informan:

*“Saya lebih milih kerja dan dapet penghasilan di banding datang ke TPS tanpa dapat apapun”.*⁷²

Wawancara sebelumnya senada dengan hasil wawancara di bawah ini:

*“Lebih baik golput dan mecari uang kan datang ke TPS tidak akan mendapat apapun”.*⁷³

Wawancara sebelumnya sependapat dengan hasil wawancara di bawah ini:

*“Saya golput karena menurut saya dengan datang ke TPS saya tidak akan mendapatkan keuntungan lebih baik saya kerja dan dapat uang”.*⁷⁴

Wawancara sebelumnya di perkuat dengan hasil wawancara di bawah ini:

*“Saya memilih bekerja dan mendapatkan hasil dibanding datang ke TPS dan tidak mendapatkan hasil”.*⁷⁵

Wawancara sebelumnya di perkuat dengan hasil wawancara di bawah ini:

*“Saya lebih memilih bekerja dan mendapatkan uang dari pada datang ke TPS”.*⁷⁶

Wawancara sebelumnya sependapat dengan hasil wawancara di bawah ini:

*“Menurut saya lebih baik saya golput dan bekerja menghasilkan uang dibanding memilih dan tidak mendapatkan apa-apa”.*⁷⁷

⁷² Hasil wawancara dengan BY informan masyarakat di kecamatan Sukarami yang dilakukan pada tanggal 10 Desember 2019

⁷³ Hasil wawancara dengan KN informan masyarakat di kecamatan Ilir Timur 3 yang dilakukan pada tanggal 13 Desember 2019

⁷⁴ Hasil wawancara dengan AN informan masyarakat di kecamatan Ilir Timur 2 yang dilakukan pada tanggal 8 Desember 2019

⁷⁵ Hasil wawancara dengan EI informan masyarakat di kecamatan Sako yang dilakukan pada tanggal 14 Desember 2019

⁷⁶ Hasil wawancara dengan EI informan masyarakat di kecamatan Kalidoni yang dilakukan pada tanggal 20 Desember 2019

⁷⁷ Hasil wawancara dengan EO informan masyarakat di kecamatan Bukit Kecil yang dilakukan pada tanggal 18 Desember 2019

Pada masyarakat Kota Palembang mereka masih menggunakan pilihan rasional dalam memilih pada Pilpres tahun 2019. Masyarakat melihat Visi dan Misi calon Presiden dan Wakil Presiden yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka mereka akan ikut memilih dalam pemilihan, sebaliknya bila masyarakat melihat visi dan misi yang diberikan calon gagal atau tidak sesuai dengan keinginan masyarakat ,maka masyarakat akan golput dalam pemilihan.

Dalam hal pilihan rasional masyarakat melihat pada apakah ada keuntungan dalam ikut serta dalam pemilihan dan jika dalam berpartisipasi ada keuntungannya dalam masyarakat, maka masyarakat akan ikut serta dalam pemilihan tapi jika dalam pemilihan masyarakat tidak diuntungkan maka masyarakat lebih memilih golput dan mencari kegiatan yang lebih menguntungkan. Individu rasional lebih mementingkan kepentingan sendiri disbanding kepentingan kelompok, hal ini pernah diungkap oleh Olson (1971) dan Down (1957).

Dari data hasil temuan peneliti diketahui beberapa informan mengatakan tidak mempercayai dan tidak peduli untuk mengikuti pemilu , alasan mereka beragam , seperti contohnya:

*”Pemilu memang diperlukan dan penting untuk pemilihan pemimpin tapi berdasarkan fakta yang ada, calon yang terpilih tidak menepati janji-janjinya setelah mereka terpilih”.*⁷⁸

Selain karena melihat fakta yang terjadi, masyarakat kota Palembang merasa tidak puas dengan hasil pemilu yang belum tentu

⁷⁸ Hasil wawancara dengan RT informan masyarakat di kecamatan Bukit Kecil yang dilakukan pada tanggal 18 Desember 2019

memperjuangkan kepentingan masyarakat, sehingga masyarakat berpikir memilih atau tidak memilih tidak akan mempengaruhi apapun sebab semua keputusan politik berada di luar kontrol pemilih. Jadi masyarakat merasa tidak perlu, bahkan ada yang tidak peduli dan tidak hadir dalam Pemilu.

Tingkat kepercayaan masyarakat mulai berkurang karena banyak janji yang tidak ditepati saat kampanye yang dilakukan, sehingga tingkat kepercayaan mulai berkurang dan setelah terpilih kebijakan yang di buat kurang memuaskan masyarakat, sehingga secara rasional masyarakat lebih memilih untuk tidak ikut memilih dan lebih memilih melakukan kepentingan yang lebih menguntungkan.

4. Faktor Tingkat Kepercayaan

Seperti yang telah dibahas pada faktor rasioanal, tingkat kepercayaan masyarakat mulai berkurang akibat pada saat kampanye banyak janji dan program yang di sampaikan calon Presiden dan Wakil presiden tapi kebanyakan janji tidak ditepati dan program yang dijalankan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat seperti hasil wawancara yang di ambil dari informan:

“Dalam pemilu ini saya tidak melihat calon yang sesuai dikarenakan menurut saya mereka hanya akan memberikan janji yang belum tentu di tepati dan hanya menjalankan program yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, sehingga membuat masyarakat kecewa dan meningkatkan rasa tidak kepercayaan masyarakat, karena itu saya lebih memilih golput “.⁷⁹

⁷⁹ Hasil wawancara dengan RT informan masyarakat di kecamatan Bukit Kecil yang dilakukan pada tanggal 18 Desember 2019

Wawancara sebelumnya senada dengan hasil wawancara di bawah ini:

“Saya tidak percaya karena banyak janji-janji yang tidak di realisasikan”.⁸⁰

Wawancara sebelumnya sependapat dengan hasil wawancara di bawah ini:

“Saya lelah dengan janji-janji palsu yang dilontarkan calon lebih baik saya golput”.⁸¹

Wawancara sebelumnya di perkuat dengan hasil wawancara di bawah ini:

“Saya golput karena melihat keadaan sekarang dimana calon pemimpin hanya mengumbar janji dan saat terpilih tidak di tepati”.⁸²

Wawancara sebelumnya di perkuat dengan wawancara sebelumnya:

“Saya lelah dengan janji-janji palsu lebih baik saya kerja”.⁸³

Wawancara sebelumnya di perkuat dengan hasil wawancara di bawah ini:

“Saya tidak percaya lagi dengan janji-janji palsu lebih baik saya golput”.⁸⁴

Wawancara sebelumnya senada dengan hasil wawancara di bawah ini:

“Kekecewaan terhadap janji yang di katakana saat kampanye tapi tak kunjung terjadi yang membawa saya golput”.⁸⁵

Wawancara sebelumnya sependapat dengan hasil wawancara di bawah ini:

“Saya golput karena banyak janji-janji palsu yang di lontarkan”.⁸⁶

⁸⁰ Hasil wawancara dengan AO informan masyarakat di kecamatan Gandus yang dilakukan pada tanggal 11 Desember 2019

⁸¹ Hasil wawancara dengan AS informan masyarakat di kecamatan Plaju yang dilakukan pada tanggal 12 Desember 2019

⁸² Hasil wawancara dengan AR informan masyarakat di kecamatan Ilir Barat 1 yang dilakukan pada tanggal 14 Desember 2019

⁸³ Hasil wawancara dengan WI informan masyarakat di kecamatan Kertapati yang dilakukan pada tanggal 17 Desember 2019

⁸⁴ Hasil wawancara dengan SI informan masyarakat di kecamatan Ilir Timur 1 yang dilakukan pada tanggal 22 Desember 2019

⁸⁵ Hasil wawancara dengan RA informan masyarakat di kecamatan Ilir Timur 3 yang dilakukan pada tanggal 13 Desember 2019

⁸⁶ Hasil wawancara dengan IN informan masyarakat di kecamatan Ilir Barat 2 yang dilakukan pada tanggal 19 Desember 2019

Wawancara sebelumnya senada dengan wawancara sebelumnya:

“saya golput karena lelah dengan janji-janji yang ada”.⁸⁷

Wawancara sebelumnya di perkuat dengan wawancara sebelumnya:

“Saya golput karena lelah dengan janji-janji yang tidak ditepati”.⁸⁸

Wawancara sebelumnya sependapat dengan hasil wawancara di bawah ini:

“Saya telah kehilangan kepercayaan dengan banyak janji-janji yang di lontarkan dan tidak di lakukan”.⁸⁹

Wawancara sebelumnya senada dengan hasil wawancara di bawah ini:

“Saya sudah lelah dengan janji yang dikatakan saat kampanye dan saat menjabat banyak janji yang tidak dilakukan”.⁹⁰

Masyarakat di Kota Palembang telah lelah dengan janji-janji yang telah disampaikan untuk mendapatkan suara sebanyak mungkin, tapi setelah itu tidak ditepati karena itu, masyarakat Kota Palembang lebih mementingkan urusan pekerjaan mereka daripada menghadiri pemilu.

5. Faktor Kesadaran Politik

Tingkat kesadaran politik masyarakat kota Palembang mulai menurun akibat tingkat ketidakpercayaan karena sering mendapat janji palsu seperti yang di bahas oleh peneliti, masyarakat Kota Palembang sudah terjebak dengan pandangan bahwa suara mereka tidak penting dan

⁸⁷ Hasil wawancara dengan MI informan masyarakat di kecamatan Ilir Timur 2 yang dilakukan pada tanggal 8 Desember 2019

⁸⁸ Hasil wawancara dengan DN informan masyarakat di kecamatan Kemuning yang dilakukan pada tanggal 7 Desember 2019

⁸⁹ Hasil wawancara dengan SO informan masyarakat di kecamatan Sako yang dilakukan pada tanggal 7 Desember 2019

⁹⁰ Hasil wawancara dengan YI informan masyarakat di kecamatan Jakabaring yang dilakukan pada tanggal 23 Desember 2019

tidak ada keuntungan dengan datang ke TPS padahal satu suara sangat penting dalam menentukan masa depan Negeri ini.

Masyarakat tidak sadar dengan pentingnya suara mereka dalam Pemilu bahkan tidak peduli dengan pemilu selain itu masyarakat juga terjebak dengan *stigma* tidak mau melakukan jika tidak mau mendapatkan keuntungan seperti yang peneliti temukan dari beberapa informan:

*“Saya sendiri tidak peduli dengan pemilu karena menurut saya suara saya tidak akan merubah apapun baik itu saya ikut memilih atau tidak ikut dalam memilih selain itu saya tidak mendapat apapun lebih baik saya bekerja”.*⁹¹

Wawancara sebelumnya ini senada dengan hasil wawancara di bawah ini:

*“Menurut saya suara saya dalam pemilu tidak akan merubah apapun”.*⁹²

Wawancara sebelumnya sependapat dengan hasil wawancara di bawah ini:

*“Menurut saya suara saya tidak akan mempengaruhi hasil pemilu jadi lebih baik saya golput dan bekerja”.*⁹³

Wawancara sebelumnya di perkuat dengan hasil wawancara di bawah ini:

*“Menurut saya suara saya tidak akan mempengaruhi apapun sehingga lebih baik saya golput”.*⁹⁴

Wawancara sebelumnya di perkuat dengan hasil wawancara di bawah ini:

*“Dengan saya memilih dan tidak memilih tidak akan merubah hasil pemilu”.*⁹⁵

⁹¹ Hasil wawancara dengan RO informan masyarakat di kecamatan Bukit Kecil yang dilakukan pada tanggal 18 Desember 2019

⁹² Hasil wawancara dengan AL informan masyarakat di kecamatan Ilir Barat 2 yang dilakukan pada tanggal 19 Desember 2019

⁹³ Hasil wawancara dengan SI informan masyarakat di kecamatan Kalidoni yang dilakukan pada tanggal 20 Desember 2019

⁹⁴ Hasil wawancara dengan AN informan masyarakat di kecamatan Sebrang Ulu 2 yang dilakukan pada tanggal 21 Desember 2019

⁹⁵ Hasil wawancara dengan AI informan masyarakat di kecamatan Sebrang Ulu 1 yang dilakukan pada tanggal 16 Desember 2019

Wawancara sebelumnya senada dengan hasil wawancara di bawah ini:

“Saya kurang tau apa penting suara saya, jadi lebih baik saya golput”.⁹⁶

Wawancara sebelumnya sejalan dengan hasil wawancara di bawah ini:

“Saya memilih golput karena menurut saya suara saya tidak penting”.⁹⁷

Kesadaran politik yang kurang di akibatkan beberapa hal seperti kurangnya ekonomi, kurangnya pendidikan, dan masih banyak hal lain yang menyebabkan kesadaran politik kurang selain itu masyarakat yang tidak memiliki hubungan dengan politik lebih memilih untuk tidak peduli karena mereka tidak mendapatkan apapun dengan berpartisipasi dalam sana berbeda dengan masyarakat yang bekerja di pemerintahan, mereka memiliki kesadaran politik tinggi karena mereka mendapatkan keuntungan dengan ikut serta didalamnya.

Tabel 3.2

Hasil Wawancara Mengenai Faktor Golput Dengan Masyarakat Kota Palembang Di Setiap Kecamatan

No	Kecamatan Di Kota Palembang	Faktor Psikologis	Faktor Sosial dan ekonomi	Faktor Kesadarann Politik	Faktor Rasional	Faktor Tingkat Kepercayaan
1	Ilir Barat 1	1	1	-	-	1
2	Ilir Barat 2	-	-	1	1	1
3	Bukit Kecil	-	1	1	1	1
4	Gandus	-	1	-	-	1

⁹⁶ Hasil wawancara dengan SI informan masyarakat di kecamatan Ilir Timur 3 yang dilakukan pada tanggal 13 Desember 2019

⁹⁷ Hasil wawancara dengan SN informan masyarakat di kecamatan Kertapati yang dilakukan pada tanggal 17 Desember 2019

5	Sukarami	-	1	-	1	1
6	Kemuning	-	1	-	-	1
7	Alang- Alalang Lebar	1	1	-	-	1
8	Iilir Timur 1	-	1	-	-	1
9	Iilir Timur 2	1	1	-	1	1
10	Iilir Timur 3	-	-	1	1	1
11	Sako	1	-	-	1	1
12	Kalidoni	-	1	1	1	-
13	Sematang Borang	1	1	-	-	-
14	Sebrang Ulu 2	-	1	1	-	-
15	Plaju	1	1	-	-	1
16	Sebrang Ulu 1	1	1	1	-	-
17	Kertapati	1	-	1	-	1
18	Jakabaring	-	-	-	1	1
Jumlah		8	13	7	8	14
Jumlah Keseluruhan = 50 orang						

Sumber: diolah oleh Peneliti

Dari tabel diatas diketahui bahwa mayoritas masyarakat di Kota Palembang golput dikarenakan faktor tingkat kepercayaan yang rendah dan faktor sosial ekonomi hal ini dikarenakan banyaknya calon Presiden dan Wakil Presiden saat berkampanye mengumbar janji yang belum tentu di lakukan saat terpilih sehingga membuat masyarakat kecewa dan dengan dorongan keuangan dimana masyarakat juga membutuhkan uang sehingga memperkuat masyarakat melakukan tindakan golput.

C. Strategi KPU Kota Palembang Dalam Mengurangi Angka Golput

Dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden KPU Kota Palembang berperan penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan juga menanggulangi atau menguri golput di kota Palembang agar terjaln pemilu yang lebih baik lagi bukan hanya itu dalam menangani golput KPU Kota Palembang melakukan berbagai cara dalam melakukan antisipasi pada Pilpres tahun 2019 yang lalu seperti dengan melakukan sosialisasi 1 tahun sebelum pemilihan dengan datang keseluruh kecamatan di Kota Palembang dari perkotaan sampai ke sudut-sudut Kota Palembang untuk melakukan sosialisasi dengan harapan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengurangi partisipasi golput.

Dalam wawancara peneliti dengan salah satu Staf Kasubbag Teknis Pemilu dan Humas KPU Kota Palembang yang bernama Ibu Syamsiah, S.H, M.H dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden melakukan strategi yaitu dengan meningkatkan lagi sosialisasi kemasyarakat agar dapat mengurrangi angka golput, hasil wawancara lebih lengkap ada di bawah ini:

*“Strategi KPU Kota Palembang dalam mengurangi angka golput pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yaitu dengan meningkatkan dan lebih memperbanyak sosialisai ke masyarakat agar masyarakat mengerti betapa pentingnya Pemilu serta memberikan pendidikan politik tentang pemilu dan dapat mengurangi angka golput dan meningkatkan partisipasi dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden”.*⁹⁸

⁹⁸ Hasil wawancara dengan informan Syamsiah, S.H, M.H Staf Kasubbag Teknis Pemilu dan Humas KPU Kota Palembang yang dilakukan pada tanggal 3 Desember 2019

Selain bertanya mengenai strategi KPU dalam mengurangi angka golput peneliti juga bertanya faktor penyebab golput di Kota Palembang karena KPU Kota Palembang sudah sering menangani permasalahan tentang golput yang terjadi, dalam wawancara dengan salah satu anggota KPU Kota Palembang di dapat jawaban :

"Ada beberapa penyebab golput di kota Palembang yaitu keadaan alam pada tiap kecamatan yang berbeda sehingga membuat malas datang ke TPS, hujan juga membuat masyarakat malas datang ke TPS, Faktor usia yang membuat kesulitan untuk datang ke TPS , Jarak tempuh yang begitu jauh dari TPS, memilih bekerja dibanding datang ke TPS".⁹⁹

Dalam hal penanganan golput KPU Kota Palembang telah melakukan sebaik mungkin agar mengurangi angka golput di kota Palembang dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu tapi walaupun begitu semua keputusan bergantung pada masyarakat.

⁹⁹ Hasil wawancara dengan informan Syamsiah, S.H, M.H Staf Kasubbag Teknis Pemilu dan Humas KPU Kota Palembang yang dilakukan pada tanggal 3 Desember 2019

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab sebelumnya disimpulkan bahwa keberadaan golput di Kota Palembang diketahui memiliki dua kategori golput berdasarkan alasan dan sebab mereka tidak menggunakan hak suaranya yang pertama yaitu kategori masyarakatan *pragmatis* karena mereka *apatis* dengan akan sistem pemilu yang berjalan dan berasumsi bahwa suara yang dimilikinya tidak akan berpengaruh dalam pemilu, sedangkan yang kedua yaitu *politis* dalam tipe ini masyarakat yang berpikir bahwa tidak ada kandidat yang akan membawa perubahan dan perbaikan dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat sehingga mereka melakukan tindak golput.

Angka golput cenderung lebih besar di perkotaan dibanding di pinggiran Kota Palembang karena masyarakat Kota lebih berpikir menggunakan pemikiran rasional dan memandang pesta demokrasi sebagai pertarungan antara satu kepentingan dengan kepentingan lainnya.

Selain itu faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan tindakan golput dan tidak ikut serta dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019 di Kota Palembang yang menyebabkan fenomena golput yaitu meliputi: faktor sosial ekonomi, faktor rasional, faktor kesadaran politik, dan faktor tingkat kepercayaan.

Dari beberapa uraian diatas diketahui bahwa faktor penyebab golput yang paling dominan adalah faktor tingkat kepercayaan yang kurang dari masyarakat akibat janji yang tidak ditepati dan faktor sosial ekonomi yang rendah membuat masyarakat lebih memilih bekerja dan mendapatkan uang disbanding tidak mendapat apapun, ada juga faktor rasioanal dan faktor psikologis yang membuat dorongan yang lebih besar agar masyarakat melakukan tindakan golput hal ini dikarenakan pandangan masyarakat yang menganggap suaranya tidak penting. Adapun strategi KPU Kota Palembang dalam mengurangi angka golput adalah dengan memperbanyak sosialisasi dan memberikan masyarakat pendidikan politik tentang betapa pentingnya Pemilu.

B. Saran

Penelitian ini akan memberikan beberapa saran dengan harapan masalah golput dapat dikurangi dan apabila nanti ada peneliti yang akan meneliti masalah golput agar lebih baik lagi, salah satu saranya yaitu:

1. Masyarakat diberikan pendidikan politik tentang betapa pentingnya Pemilu dan diberikan info calon Presiden dan Wakil presiden yang akan dipilih sehingga mereka tidak salah pilih dan memahami calon pemimpin mereka.
2. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu dan partai politik juga *minim*, sehingga hal ini harus diperhatikan oleh partai politik dan wakil-wakil rakyat yang sudah terpilih menunjukan

perilaku yang baik dan menepati janji-janji yang disampaikan saat melakukan kampanye dan menjalankan program yang direncanakan sebaik-baiknya agar tidak membuat masyarakat kecewa dan usaha ini diharapkan akan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk aktif dan ikut dalam pemilihan.

3. Bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian tentang golput agar dapat membuat penelitian yang lebih baik lagi dan lebih memperdalam masalah golput agar angka golput dapat di kurangi dan dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Daftar Pustaka

1. Dari Buku

- Abdullah, Rozali. *Mewujudkan Pemilu yang lebih berkualitas*. Rajagrafindo Persada, Divisi Rajawali Pers
- Basrowi, M. dan Suwandi. 2008. *Memahami penelitian kualitatif*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Bimo, Walgito. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta : Penerbit Andi Yogyakarta. 2010 Hlm. 26
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Gaffer, Janedjri M. 2012. *Politik Hukum Pemilu*. Konstitusi press. Jakarta.
- Harrison, Lisa. 2016. *Metodelogi penelitian politik*. Prenada Media
- Kristiandi, J. 1997. *Menyelenggarakan pemilu yang bersifat luber dan jurdil*. CSIS. Jakarta.
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia. Jakarta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & B*. Alfabeta. Bandung.
- Suwandi dan Basrowi, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rinika Cipta. Jakarta.
- Samit, Arbi. 1992. *Golput: Aneka Pandangan Fenomena Politik*. Pustaka sinar harapan. Jakarta.

2. Dari Jurnal atau Skripsi

Pranata,Riski.2016. *Faktor-Faktor Penyebab Golput Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015 (Studi Pada Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung)*: penerbit Universitas Lampung

Prisina, Rike. 2014. *Fenomena Golongan Putih Di Kalangan Mahasiswa Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014*: penerbit Universitas Lampung

Setiawan, Arie.2012. *Perilaku Golput Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Waringin Barat Kecamatan Sukorojo Kabupaten Prengsewu*: penerbit Universitas Lampung.

Solin,Dedi Wansah.2016. *Faktor Penyebab Tingginya Golput Pada Pilpres Tahun 2014 Di Masyarakat Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Terkait Fatwa Mui Tentang Golput*: penerbit Universitas Islam Negri Sumatera Utara

Tia Subekti, 2014 : *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum: Studi Turn of Voter dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013*. Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya.

Yatarullah. 2015. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kehadiran Dan Ketidakhadiran Pemilih Di Tps (Voter Turn-Out) Pada Pemilu Tahun 2014 di Kabupaten Kampar*. KPU Kampar. Riau

3. Dokumen

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang asas pemilu tahun 2019

4. Dari situs internet

<https://palembangkota.bps.go.id/>

<https://www.kpu.go.id/>

<https://sejarahlengkap.com/indonesia/sejarah-singkat-pemilu-di-indonesia>

<https://www.dpr.go.id/>

<https://setkab.go.id/>

[https://peraturan.bpk.go.id,](https://peraturan.bpk.go.id)

**PENDOMAN WAWANCARA UNTUK RESPONDEN STAF DAN
ANGGOTA KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN:**

1. Apa faktor penyebab golput di kota Palembang ?
2. Bagaimana strategi yang di lakukan dalam mengurangi tingkat partisipasi golput ?
3. Sejak kapan dilakukan sosialisasi tentang pemilu ke masyarakat ?
4. Apakah tiap wilayah di kota Palembang telah di lakukan sosialisasi ?

**PENDOMAN WAWANCARA UNTUK RESPONDEN STAF DAN
ANGGOTA KPU KOTA PALEMBANG:**

1. Apa faktor penyebab golput di kota Palembang ?
2. Bagaimana Strategi yang di lakukan dalam mengurangi tingkat partisipasi golput ?
3. Sejak kapan dilakukan sosialisasi tentang pemilu ke masyarakat ?
4. Apakah tiap wilayah di kota Palembang telah di lakukan sosialisasi ?

**PENDOMAN WAWANCARA UNTUK MASYARAKAT KOTA
PALEMBANG:**

1. Apakah anda tau apa itu golput ?
2. Apakah anda golput dalam di Pilpres 2019 ini ?

3. Apa yang membuat anda melakukan tindak golput ?
4. Faktor apa saja yang membuat masyarakat melakukan tindakan golput ?
5. Apakah di tempat anda ada sosialisasi dari KPU Kota Palembang yang membahas tentang pentingnya Pemilu ?
6. Apakah ada kampanye yang di lakukan Tim Kemenangan Calon Pilpres atau partai politik di Tempat anda ?

Tabel Wawancara Dengan Masyarakat Kota Palembang

NO	Nama	Kecamatan	Hasil wawancara
1	AD	Alang-Alang Lebar	Pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, saya pribadi mengatakan golput saat itu di karenakan saya tidak terlalu percaya terhadap figur kedua pasang calon pada Pilpres, selain itu suara yang terhitung satu yang saya miliki tidak akan merubah hasil pilpres dan saya lebih memilih untuk golput dan menjalankan kesibukan yang saya anggap lebih penting
2	SI	Alang-Alang Lebar	Saya golput karena saya

			<p>kurang mengetahui visi dan misi yang ingin di sampaikan oleh calon Pilpres karena di tempat saya tidak ada kampanye yang di lakukan tim kemenangan calon jadi saya lebih memilih golput</p>
3	YE	Alang-Alang Lebar	<p>Saya golput karena visi dan misi yang di lontarkan calon menurut saya tidak akan merubah kehidupan saya lebih baik saya bekerja</p>
4	YF	Sukarami	<p>Pada Pilpres tahun lalu saya memang memilih dikarenakan tingginya ekspektasi pada Jokowi-Jusuf Kalla tapi melihat kinerjanya selama masa periode jabatannya, saya tidak melihat perubahan pada kehidupan saya pribadi, namun pada Pilpres 2019 ini saya lebih memilih tidak menggunakan hak suaranya karena tidak percaya lagi pada figur</p>

			kandidat ,kemudian memilih atau tidak memilih tidak akan berpengaruh pada kehidupan saya
5	OA	Sukarami	Saya memilih golput karena saya merasa bahwa suara saya belum tentu memiliki efek dalam pemilihan Pilpres dan dan jika saya memilih juga saya tidak mendapat apapun hanya rasa capek dibanding itu lebih baik saya ngojek dan mendapatkan uang, contoh saja yang memiliki pendidikan yang tinggi aja susah dalam mencari pekerjaan apalagi saya yang lulusan sd jadi saya pikir lebih baik saya bekerja
6	BY	Sukarami	Saya lebih milih kerja dan dapat penghasilan di banding milih tanpa dapet apapun
7	SI	Gandus	Dalam kampanye mereka berusaha mendekati diri dengan masyarakat agar dapat dipilih dalam pemilu tapi

			setelah mendapatkan banyak suara kebanyak mereka tidak melakukan hal itu lagi
8	AO	Gandus	Saya tidak percaya karena banyak janji-janji yang tidak di realisasikan
10	HN	Plaju	Saya golput karena tidak ada sosialisasi di tempat saya
11	AS	Plaju	Saya lelah dengan janji-janji palsu yang dilontarkan calon lebih baik saya golput
12	BM	Plaju	Saya lebih milih kerja dibanding memilih
13	AR	Iilir Barat 1	Sebenarnya pada Pilpres yang lalu saya lebih memilih golput karena setelah saya analisa dari pilpres tahun lalu hanya menghasilkan kekecewaan dari diri saya pribadi, ketika saya lihat saat kampanye kandidat calon Presiden dan Wakil Presiden hanya mengumbar janji dan setelah terpilih tidak dibuktikan dan hanya tinggal sebuah janji,hal

			itu terus terulang hingga menimbulkan pandangan buruk yang menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat berkurang
14	SO	Iilir Barat 1	Saya kurang tau dengan visi dan misi calon karena tidak ada kampanye yang dilakukan disini
15	RI	Iilir barat 1	Saya lebih milih kerja dan dapet uang dibanding milih
16	NI	Kertapati	Saya lebih baik kerja dan dapat uang
17	SN	Kertapati	Saya memilih golput karena menurut saya suara saya tidak penting
18	WI	Kertapati	Saya lelah dengan janji-janji palsu lebih baik saya kerja
19	GT	Iilir Timur 1	Dalam pemilihan pada Pilpres tahun ini saya lebih memilih golput dan menjual gorengan karena jika saya memilih tidak akan merubah apapun bahkan nasib saya juga tidak berubah lebih baik saya bekerja dan

			menhasilkan uang , jika saya dipikir jika saya tidak bekerja dan lebih memilih datang ke TPS gimana saya memberi makan keluarga saya kareana itu saya lebih memilih golput
20	SI	Iilir Timur 1	Saya tidak percaya lagi dengan janji-janji palsu lebih baik saya golput
21	RA	Iilir Timur 3	Kekecewaan terhadap janji yang di katakan saat kampanye tapi tak kunjung terjadi yang membawa saya golput
22	SI	Iilir Timur 3	saya mengatakan bahwa bukan faktor eksternal yang menyebabkan saya melakukan tindak golput namun dari diri saya pribadi menolak dan tidak ingin ikut campur dalam aktivitas politik yang selama ini syarat akan kepentingan satu golongan saja dan tidak akan merubah hidup saya , selain itu saya juga tidak mengenal

			kandidat Pilpres yang melakukan sosialisasi di daerah Plaju karena itulah saya melakukan tindak golput karena menurut saya tidak terlalu penting buat saya
23	KN	Iilir Timur 3	Lebih baik golput dan mencari uang kan datang ke TPS tidak akan mendapat apapun
24	RT	Bukit kecil	Dalam pemilu ini saya tidak melihat calon yang sesuai dikarenakan menurut saya mereka hanya akan memberikan janji yang belum tentu di tepati dan hanya menjalankan program yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, sehingga membuat masyarakat kecewa dan meningkatkan rasa tidak kepercayaan masyarakat, karena itu saya lebih memilih golput
25	EO	Bukit kecil	Menurut saya lebih baik saya golput dan bekerja menghasilkan

			uang dibanding memilih dan tidak mendapatkan apa-apa
26	SO	Bukit kecil	Saya golput karena menurut saya lebih penting bekerja dibanding saya datang ke TPS
27	RO	Bukit kecil	Saya sendiri tidak peduli dengan pemilu karena menurut saya suara saya tidak akan merubah apapun baik itu saya ikut memilih atau tidak ikut dalam memilih selain itu saya tidak mendapat apapun lebih baik saya bekerja
28	AL	Iilir Barat 2	Menurut saya suara saya dalam pemilu tidak akan merubah apapun
29	AN	Iilir Barat 2	Menurut saya lebih baik bekerja dibanding datang ke tps
30	IN	Iilir Barat 2	Saya golput karena banyak janji-janji palsu yang di lontarkan
31	RA	Iilir timur 2	Saya kurang mengenal calon Pilpres karena tidak ada kampanye yang di lakukan di tempat saya
32	UI	Iilir Timur 2	saya golput karena pekerjaan yang memiliki

			gaji kecil dan tak menentu sehingga membuat saya lebih memilih bekerja dibanding datang ke TPS
32	MI	Iilir Timur 2	saya golput karena lelah dengan janji-janji yang ada
33	AN	Iilir Timur 2	Saya golput karena menurut saya dengan datang ke TPS saya tidak akan mendapatkan keuntungan lebih baik saya kerja dan dapat uang
34	HD	Kemuning	saya sendiri golput karena pendidikan yang saya miliki rendah sehingga mendapatkan pekerjaan yang gajinya tidak menentu dan membuat saya lebih memilih bekerja di banding datang ke TPS
35	DN	Kemuning	Saya golput karena lelah dengan janji-janji yang tidak ditepati
36	JF	Sako	Saya golput karena tidak adanya kampanye di daerah saya yang membuat saya kurang tertarik dalam memilih

37	EI	Sako	Saya memilih bekerja dan mendapatkan hasil dibanding datang ke TPS dan tidak mendapatkan hasil
38	SO	Sako	Saya telah kehilangan kepercayaan dengan banyak janji-janji yang di lontarkan dan tidak di lakukan
39	HA	Kalidoni	saya melakukan tindak golput karena faktor pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan karena gaji yang tidak menentu
40	SI	Kalidoni	Menurut saya suara saya tidak akan mempengaruhi hasil pemilu jadi lebih baik saya golput dan bekerja
41	EI	Kalidoni	Saya lebih memilih bekerja dan mendapatkan uang dari pada datang ke TPS
42	DN	Sematang Borang	Saya kurang tertarik untuk memilih karena tidak ada kampanye yang dilakukan di daerah tempat saya
43	LA	Sematang Borang	Saya lebih baik bekerja di

			banding datang karena dengan datang ke TPS saya tidak mendapat apapun
44	SI	Sebrang Ulu 2	saya golput karena faktor ekonomi yang kurang dan pekerjaan tidak menentu
45	AN	Sebrang Ulu 2	Menurut saya suara saya tidak akan mempengaruhi apapun sehingga lebih baik saya golput
46	AG	Sebrang Ulu 1	Saya kurang tau dengan visi dan misi calon karena tidak ada kampanye yang dilakukan jadi saya memilih golput
47	FI	Sebrang Ulu 1	Saya golput karena pendidikan yang kurang sehingga mendapatkan pekerja yang gajinya tidak stabil membuat
48	AI	Sebrang Ulu 1	Dengan saya memilih dan tidak memilih tidak akan merubah hasil pemilu
49	YA	Jakabaring	Saya lebih baik bekerja dan mendapatkan uang dari pada datang ke TPS dan tidak menghasilkn

			sesuatu
50	YI	Jakabaring	Saya sudah lelah dengan janji yang dikatakan saat kampanye dan saat menjabat banyak janji yang tidak dilakukan

LAMPIRAN



Gambar 1 pengambilan data Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara
Pilpres 2019 di wilayah Sumatera Selatan



Gambar 2 wawancara dengan Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan mengenai
penyebab faktor golput serta strategi yang akan dilakukan dalam mengurangi
tingkat golput



Gambar 3 wawancara dengan Staf dan Anggota KPU Kota Palembang tentang faktor penyebab golput dan strategi yang dilakukan dalam mengurangi tingkat golput serta mengambil data Partisipasi pada Pilpres 2019 di Kota Palembang



Gambar 4 wawancara dengan masyarakat Kota Palembang tentang faktor penyebab golput serta apakah diwilayah informan dilakukan sosialisasi oleh KPU Kota Palembang serta Kampanye yang di lakukan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta Partai Politik



Gambar 5 wawancara dengan masyarakat Kota Palembang tentang faktor penyebab golput serta apakah diwilayah informan dilakukan sosialisasi oleh KPU Kota Palembang serta Kampanye yang di lakukan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta Partai Politik



Gambar 6 wawancara dengan masyarakat Kota Palembang tentang faktor penyebab golput serta apakah diwilayah informan dilakukan sosialisasi oleh KPU Kota Palembang serta Kampanye yang di lakukan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta Partai Politik



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)**

Nomor : B.1895/Un.09/VIII/TL.01/11/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Palembang, 6 November 2019

Kepada Yth
Masyarakat Kota Palembang
Di
Tempat

Assalammu'alaikum, Wr. Wb

Dalam rangka menyelesaikan penulisan Karya Ilmiah berupa Skripsi/makalah mahasiswa kami :

Nama : Rico Miranda Syahputra
NIM : 1627020104
Semester : VII (Tujuh)
Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Judul Skripsi : Golput Di Kota Palembang Pada Pilpres 2019
(Analisis Faktor Penyebab Dan Usaha Antisipasi Di Masa Depan Oleh KPU Kota Palembang)

Sehubungan dengan itu kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melaksanakan Penelitian Sehingga memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan beserta penjelasan Lainnya dari Instansi/Lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk kemudian digunakan dalam penyusunan tugas dimaksud.

Demikianlah, harapan kami dan atas segala bantuan serta perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb

Palembang, 6 November 2019



Tembusan
1. Ka.Prodi Ilmu Politik
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)**

Nomor : B.1895/Un.09/VIII/TL.01/11/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Palembang, 6 November 2019

Kepada Yth
Tokoh Masyarakat Kota Palembang
Di
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Dalam rangka menyelesaikan penulisan Karya Ilmiah berupa Skripsi/makalah mahasiswa kami :


Nama : Rico Miranda Syahputra
NIM : 1627020104
Semester : VII (Tujuh)
Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Judul Skripsi : Golput Di Kota Palembang Pada Pilpres 2019
(Analisis Faktor Penyebab Dan Usaha Antisipasi Di Masa Depan Oleh KPU Kota Palembang)

Sehubungan dengan itu kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melaksanakan Penelitian Sehingga memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan beserta penjelasan Lainnya dari Instansi/Lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk kemudian digunakan dalam penyusunan tugas dimaksud.

Demikianlah, harapan kami dan atas segala bantuan serta perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb

Palembang, 6 November 2019

Dekan,

Prof. Dr. Izomiddin, MA
NIP.196206201988031001

Tembusan
1. Ka. Prodi Ilmu Politik
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)**

Nomor : B.1895/Un.09/VIII/TL.01/11/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Palembang, 6 November 2019

Kepada Yth
Ketua KPU Kota Palembang
Di
Tempat

Assalammu'alaikum, Wr. Wb

Dalam rangka menyelesaikan penulisan Karya Ilmiah berupa Skripsi/makalah mahasiswa kami :

Nama : Rico Miranda Syahputra
NIM : 1627020104
Semester : VII (Tujuh)
Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Judul Skripsi : Golput Di Kota Palembang Pada Pilpres 2019
(Analisis Faktor Penyebab Dan Usaha Antisipasi Di Masa Depan Oleh KPU Kota Palembang)

Sehubungan dengan itu kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melaksanakan Penelitian Sehingga memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan beserta penjelasan Lainnya dari Instansi/Lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk kemudian digunakan dalam penyusunan tugas dimaksud.

Demikianlah, harapan kami dan atas segala bantuan serta perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb

Palembang, 6 November 2019



Dekan,
Prof. Dr. Izomiddin, MA
NIP.196206201988031001

Tembusan
1. Ka.Prodi Ilmu politik
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)**

Nomor : B.2124 /Un.09/VIII./TL.01/12/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Izin Penelitian

5 Desember 2019

Kepada Yth
Kepala Kesbangpol Kota Palembang
Di
Tempat

Assalammu'alaikum, Wr. Wb

Dalam rangka menyelesaikan penulisan Karya Ilmiah berupa Skripsi/makalah mahasiswa kami :

Nama : Rico Miranda Syahputra
NIM : 1627020104
Semester : VII (Tujuh)
Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri
Raden Fatah Palembang
Judul Skripsi : Golput Di Kota Palembang Pada Pilpres 2019 (Analisis Faktor Penyebab Dan Usahaantisipasi Di Masa Depan Oleh KPU Kota Palembang)

Sehubungan dengan itu kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melaksanakan Penelitian Sehingga memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan beserta penjelasan Lainnya dari Instansi/Lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk kemudian digunakan dalam penyusunan tugas dimaksud.

Demikianlah, harapan kami dan atas segala bantuan serta perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb



Dekan,
Prof. Dr. Izomiddin, MA
NIP.196206201988031001

Tembusan
1. Ka.Prodi Ilmu Politik
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALEMBANG
JL. LUNJUK JAYA NOMOR 3 – DEMANG LEBAR DAUN PALEMBANG
TELPON (0711) 368726
Email : badankesbang@yahoo.co.id

Palembang, 12 Desember 2019

Nomor : 070/1772/BAN-KBP/2019
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian/Pengambilan Data.

Kepada Yth.
1. Camat Se-Kota Palembang.
2. Lurah Se-Kota Palembang.
di-
Palembang

Memperhatikan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor : B.2124/Un.09/VIII/TL.01/12/2019 Tanggal 05 Desember 2019 perihal tersebut diatas, dengan ini diberitahukan kepada saudara bahwa :

No.	Nama	NIM	Judul Penelitian
1.	Rico Miranda Syahputra	1627020104	Golput di Kota Palembang pada Pilpres 2019 (Analisis Faktor Penyebab dan Usaha Antisipasi di Masa Depan Oleh KPU Kota Palembang).

Untuk Melakukan Penelitian.

Lama Pengambilan Data : 12 Desember 2019 s/d 12 Maret 2020

Dengan Catatan :

1. Sebelum melakukan penelitian/survey/riset terlebih dahulu melapor kepada pemerintah setempat.
2. Penelitian tidak diizinkan menanyakan soal politik, dan melakukan penelitian/survey/riset yang sifatnya tidak ada hubungan dengan judul yang telah diprogramkan.
3. Dalam melakukan penelitian/survey/riset agar dapat mentaati peraturan perundang-undangan dan adat istiadat yang berlaku di daerah setempat.
4. Apabila izin penelitian/ survey/riset telah habis masa berlakunya, sedang tugas penelitian/survey/riset belum selesai maka harus ada perpanjangan izin.
5. Setelah selesai mengadakan penelitian/survey/riset diwajibkan memberikan laporan tertulis kepada Walikota Palembang melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang.

Demikian untuk dimaklumi dan untuk dibantu seperlunya.

a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PALEMBANG
Pit. KEPALA BIDANG KESATUAN BANGSA


Dra.Hj.Radiostuti.MM
PEMBINA
NIP.196205071983032006

Tembusan :
1. Dekan FISIP UIN Raden Fatah Palembang.
2. Mahasiswa Ybs.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG

NOMOR : B. 1815/Un.09/VIII/PP.01/11/2019

Tentang

PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG

- MENIMBANG :**
- 1 Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu di bimbing oleh tenaga Ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka menyelesaikan penyusunan skrip
 - 2 Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan.
 - 3 Lembar persetujuan judul dan penunjukan Pembimbing Skripsi oleh Ketua Prodi Ilmu Politik **a.n: Rico MirandaSyahputra, Tanggal 28 Oktober 2019**
- MENGINGAT :**
- 1 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
 - 2 Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 407 tahun 2000
 - 3 Instruksi Direktur Bimbaga Islam Departemen RI Nomor KEP/E/PP.00.9/147/1985 tanggal 5 Juni 1985 tentang pelaksanaan SKS dan Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah
 - 4 Instruksi Menteri Agama RI No.B/152/1994 tentang Pelaksanaan SKS Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah
 - 5 Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Raden Fatah No. 585 tahun 2016
 - 6 Kep.Menag RI No. 62 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

Pertama :

Menunjuk Saudara:

N A M A	NIP/NIDN	Sebagai
Andi Chandra Jaya, M.Hum	197201192007011011	Pembimbing I
Raegen Harahap, MA		Pembimbing II

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masing-masing Sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik saudara :

N a m a	: Rico Miranda Syahputra
N I M	: 1627020104
Prodi	: Ilmu Politik
Judul Skripsi	: Golput Di Kota Palembang Pada Pilpres 2019
	: (Analisis Faktor Penyebab Dan Usaha Antisipasi Dimasa depan Oleh KPU Kota Palembang)

- Masa bimbingan : Satu Tahun TMT. 5 November 2019 s/d 5 November 2020
- Kedua : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberi hak sepenuhnya untuk merevisi Judul/kerangka Skripsi tersebut tanpa mengubah substansi penelitian.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Tembusan:

1. Rektor;
2. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan
3. Pembimbing Skripsi (1 dan 2)
4. Ketua Prodi Ilmu Politik
5. Mahasiswa yang bersangkutan

Palembang, 5 November 2019

Pih. Dekan.


Dr. Feri M Si



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3,5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING I SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Andi Candra Jaya, M. Hum
NIP : 197201192007011011

menyatakan bersedia / tidak bersedia menjadi Pembimbing I untuk Skripsi mahasiswa sebagai berikut :

Nama	RICO MIRANDA SYAHPUTRA
NIM	16270201041
Fakultas	ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Program Studi	ILMU POLITIK
Judul Skripsi	Golput Di Kota Palembang Pada Pilpres 2019 (Analisis Faktor Penyebab dan Usaha Antisipasi Di Masa Depan oleh KPU kota Palembang)

Demikianlah Pernyataan Kesiediaan ini dibuat dengan sebenarnya.

Palembang, 28-10-2019


Andi Candra Jaya, M. Hum

NIP. 1972 0119 2007 011011



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING II SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Raegen Harahap, M.A
NIP :

menyatakan bersedia / tidak bersedia menjadi Pembimbing II untuk Skripsi mahasiswa sebagai berikut :

Nama	RICO MIRANDA SYAHPUTRA
NIM	1627 02010 9
Fakultas	Ilmu sosial dan Ilmu politik
Program Studi	Ilmu Politik
Judul Skripsi	Golput Di kota Palembang Pada Pilpres 2019 (Analisis Faktor penyebab dan usaha Antisipasi di masa depan oleh KPU kota Palembang)

Demikianlah Pernyataan Kesiediaan ini dibuat dengan sebenarnya.

Palembang, 28-10-2019

Raegen Harahap, M.A



RADEN FATAH
PALEMBANG

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
PEMBIMBING II

Nama Mahasiswa : RICO MPANDA SYAH PUTRA
NIM : 1627020104
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : Golput Di Kota Palembang Pada Pilpres 2019
(Analisis Faktor Penyebab dan Usaha Antisipasi
Dimasa depan oleh KPU Kota Palembang)
Pembimbing I : Andi Gandra Jaya, M. Hum
Pembimbing II : Raegen Harahap, M. A

No.	Hari / Tanggal	Urutan Materi yang Dikonsultasikan	Tandatangan Pembimbing
1.	28 Oktober 2019	Latar belakang kurang	
2.	29 Oktober 2019	Revisi Latar belakang	
3.	30 Oktober 2019	Perbaikan sistematika penulisan	
4.	4 Oktober ^{November} 2019	penambahan bab I	
5.	7 Oktober ^{November} 2019	Revisi Bab I	
6.	11 November 2019	Lansut bab II	
7.	15 November 2019	Penambahan data pada bab II	
8.	18 November 2019	Revisi Bab II	



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

No.	Hari/ Tanggal	Uraian Materi yang Dikonsultasikan	Tandatangan Pembimbing
10.	25 November 2019	ACC Bab II	
10	28 November 2019	Penambahan Isi Bab III	
11	4 Desember 2019	Penambahan data dan tabel pada Bab III	
12	5 Desember 2019	Revisi Bab III	
13.	14 Januari 2020	Penambahan bab IV	
14.	21 Januari 2020	Revisi Bab IV	
15	4 Februari 2020	ACC Bab IV	



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

JL. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari Kamis tanggal 27 bulan 02 tahun 2020 Skripsi Mahasiswa :

Nama : Rico Miranda Syahputra
 Nomor Induk Mahasiswa : 1627020104
 Jurusan/Program Studi : Ilmu Politik
 Judul Skripsi : Golput di kota Palembang pada Pilpres tahun 2019
 (Analisis Faktor penyebab dan usaha Antisipasi di masa depan oleh KPU Kota Palembang)

MEMUTUSKAN

1. Setelah mengumpulkan Nilai Teori dan hasil Munaqasyah pada hari ini..... maka saudara dinyatakan : **LULUS/ TIDAK-LULUS**,
 Indeks Prestasi Kumulatif : 3,70, oleh karena itu saudara berhak memakai gelar Sarjana Strata Satu (SI) **Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos)**.
2. Perbaikan dengan Team Penguji selambat-lambatnya 2 (dua) Minggu/ sebelum penutupan pendaftaran Wisuda terhitung sejak ditetapkan.
3. Apabila melanggar point 2 diatas, maka dinyatakan belum bisa diikutsertakan mengikuti Wisuda yang diselenggarakan pada periode berjalan.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Team Penguji :

NO.	TEAM PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. Ahmad Syukri, M.Si	Ketua Penguji	
2	Gita Astrid, M.Si	Sekretaris Penguji	
3	Taufik Akhyar, M.Si	Penguji Utama	
4	Affif Musthofa Kawwami, M.Sos	Penguji Kedua	
5	Dr. Andi Candra Jaya, M.Hum	Pembimbing I	
6	Raiqun Haranap, M.A	Pembimbing II	

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
 PADA TANGGAL :

KETUA,

Dr. Ahmad Syukri, M.Si
 NIP. 197701252005011004

SEKRETARIS,

Gita Astrid, M.Si
 NIP. / NIDN. 2025128703

BLANKO MUNAQASYAH



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami Ketua Sidang Munaqasyah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang dengan ini menerangkan :

Nama : Rico Miranda Syahputra

NIM : 1627020109

Jurusan : Ilmu Politik

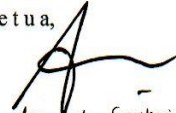
Judul Skripsi : Gol Put Di kota Palembang Pada Pilpres tahun 2019
(Analisis Faktor Penyebab dan Usaha Antisipasi di masa
depan oleh KPU kota Palembang)

Telah dimunaqasyahkan pada hari Kamis tanggal 27 bulan 02 tahun 2020

dinyatakan **LULUS / ~~TIDAK LULUS~~** Dengan Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,70

Palembang,

Ketua,


Dr. Ahmad Syukri, M.Si

NIP. 19720125 200101 014

Tembusan :



1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
2. Yang bersangkutan
3. Arsip.

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama : Rleo Miranda Stahputra
 NIM : 1627 02 0104
 Program Studi : Ilmu Politik
 Tanggal Ujian Munaqosah : 27 Februari 2020
 Judul Skripsi :

Golongan putih (Golput) Di kota Palembang pada Pilpres Tahun 2019 (Analisis Faktor Penyebab Dan Strategi KPU kota Palembang Dalam Menyurangi Angka Golongan Putih)

TELAH DI REVISI SESUAI MASUKAN DAN SARAN PADA SAAT UJIAN MUNAQOSAH dan TELAH DISETUJUI OLEH DOSEN PENGUJI I dan DOSEN PENGUJI II.

NO.	NAMA DOSEN PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Taufik Akhyar, M.Si	Penguji I	
2	Afif Musthofa Kawwami, M. Sos	Penguji II	

Palembang, 6 Maret 2020

Menyetujui,


 Dr. Andi Condra Jafa, M. Hum
 Dosen Pembimbing I


Raehan Harahap, M. A
 Dosen Pembimbing II